

**NOTULENSI JAMBORE PEREMPUAN TOLAK TAMBANG**  
**14-16 FEBRUARI 2019**

**Daftar Isi:**

1. Diskusi Nasional: Halaman 2
2. Diskusi Tematik I: Halaman 12
3. Diskusi Tematik II: Halaman 15
4. Diskusi Tematik III: Halaman 18
5. Diskusi Tematik IV: Halaman 22
6. Diskusi Tematik V: Halaman 27
7. Diskusi Tematik VI: Halaman 35
8. Diskusi Tematik VII: Halaman 35
9. Usulan Rencana Tindak Lanjut: Halaman 41
10. Lampiran I (Foto Kegiatan): Halaman 42
11. Lampiran II (Jadwal Kegiatan): Halaman 44

**Hari I: 14 Februari 2019**

**Metode notulensi: Verbatim**

***DISKUSI NASIONAL: PERLUASAN GEOGRAFI PRODUKSI INDUSTRI EKSTRAKTIF,  
BENCANA EKOLOGIS, DAN PENYINGKIRAN KAUM PEREMPUAN***

*HARYATI (KORBAN LUMPUR LAPINDO-PORONG)*

Setelah terjadinya bencana lumpur Lapindo pada tahun 2006, banyak kaum perempuan disini terkena kanker servik dan kanker payudara. Lima tahun kemudian kita mulai mendeteksi gejala tersebut.

Pemerintah tidak tahu penyebarannya. Lalu, kami mulai melakukan identifikasi persoalan kesehatan tersebut. Kami melakukannya selama satu tahun. Di tingkat pemerintah kecamatan dan kabupaten juga tidak punya data tentang persoalan tersebut.

Selain persoalan kanker, kami ketahui ada 4 desa yang juga terserang penyakit ispa. Dulu, sebelum bencana lumpur Lapindo, penyakit ini tidak ada. Karena jenis-jenis penyakit tersebut, menurut saya, hanya penyakit yang sering menyerang orang kaya.

Untuk berobat jenis penyakit tersebut, biayanya cukup mahal sekali. Sementara, disini ratusan perempuan banyak terkena penyakit kanker. Ditahun 2015, saya pernah di undang oleh Buk Khofifah (Gubernur Jatim terpilih saat ini), bahwa ia akan berusaha membantu saat menjadi menteri sosial. Akan tetapi sampai jadi Gubernur saat ini, belum ada keputusan untuk menyelesaikan persoalan ini.

Di tengah lingkungan yang sudah tidak sehat lagi, saya merasa untuk ke depan banyak perempuan disini yang akan menjadi korban terserang jenis-jenis penyakit tersebut. Bau lumpur Lapindo dan PH (logam berat) yang tinggi tentu membuat air disini tidak layak dikonsumsi.

Perempuan sejak bangun pagi sudah bersentuhan dengan air. Apakah ada jaminan dari pemerintah pusat untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat Porong? Untuk itu, pemerintah jangan hanya mempublikasikan persoalan ganti rugi. Karena nasib kesehatan kami ke depan tidak bisa diukur dengan uang.

Kita tahu, untuk biaya perobatan kanker biasanya mencapai ratusan juta rupiah. Kalau saya bercerita soal Porong satu hari tidak selesai. Belum soal pemulihan sosial ekonominya. Kita tetap bersikeras untuk tetap berdiri dan berjuang untuk generasi bangsa.

*RATNA BANYUWANGI (WARGA LERENG GUNUNG TUMPANG PITU)*

Di Banyuwangi ada pertambangan terbesar kedua setelah Freeport. Pertambangan itu tidak layak untuk diletakkan di Banyuwangi. Soalnya berdekatan dengan

perkampungan warga dan laut. Kita disana memiliki laut Pancer, dan hasilnya bagi nelayan cukup baik.

Gunung Tumpang Pitu itu benteng pada tahun 1994, saat bencana tsunami datang. Tsunami itu dulu tidak bisa melewati seluruh kampung karena ada gunung Tumpang Pitu. Namun begitu korbannya tetap mencapai 200-an orang lebih.

Akan tetapi gunung Tumpang Pitu sekarang sudah rata karena pertambangan. Lalu, bagaimana jika tsunami datang lagi? Pertambangan itu juga memiliki sianida. Itulah yang semakin ditakuti. Karena kalau air kami kena racun gimana generasi kita? Tapi pemerintah tidak memikirkan hal itu. Saya pernah melakukan aksi tolak tambang, tapi pemerintah melakukan kriminalisasi terhadap saya, dengan tuduhan telah membawa spanduk aksi tolak tambang berlogo yang mirip palu arit. Padahal saya tidak tahu komunis itu apa?

Kita bisa hidup sejahtera dengan sumber daya kita. Nelayan Pancer bisa mencukupi keluarganya. Kenapa harus ada pertambangan? Kini kita hanya bisa merasakan debu, dan banyaknya kendaraan lalu lalang untuk pertambangan. Makanya kita mengadu kepada siapa? Saya juga mendatangi KLHK untuk langka selanjutnya.

Pertambangan di Tumpang Pitu tidak hanya dilakukan oleh PT BSI, tapi juga DSI. Pertambangan satu aja udah merusak, apalagi ada pertambangan lagi. Kita itu sudah kaya dari pertanian bukan pertambangan.

Sampai sekarang kasus rekan kami, mas Budi, masih terombang-ambing. Ia dituduh menyebarkan spanduk aksi tolak tambang yang berlogo mirip palu arit. Waktu itu kita mau aksi dan bikin 11 spanduk di rumah mas budi. Bikin spanduk agar orang tau kalau pertambangan itu mengancam kita. Kasus ini sudah dua tahun.

#### *IKE (WARGA PESISIR LUMAJANG)*

Saya ingin bercerita 6 tahun yang lalu saat dimulai pertambangan di kampung saya. Pada saat itu ada orang yang mau menambang dan ayah saya ingin menutup pertambangan. Pada Juni 2015 ayah saya mulai melakukan aksi penolakan, tapi ayah saya didatangi dan dikeroyok oleh mafia tambang.

Pada bulan September 2015 ayah saya ingin melakukan aksi damai. Pada tanggal 26 September ayah saya kebobolan. Mereka menganiaya ayah saya sampai balai desa. Selain itu juga ada 7 orang yang terancam.

Pelaku mulai tertangkap, namun hanya 37 orang, padahal keseluruhan jumlah pelaku ada 60-an orang. Dan kini banyak pelaku yang sudah keluar. MA hanya memvonis 20 tahun penjara terhadap mereka.

Setelah kejadian itu berlalu, sekarang kelompok pemuda-pemuda disana melakukan penghijauan. Disela-sela itu banyak rintangan. Karena di tahun 2018 pertengahan

mulai ada investor yang berkedok usaha tambak mulai akan masuk ke desa. Dugaan kami, itu hanya modus untuk melakukan pertambangan.

Di awal sosialisasi tersebut, saya mendapatkan undangannya. Tapi, untuk undangan berikutnya saya tidak diundang karena mereka tau kalau saya menolak. Mereka hanya mengundang ibu saya.

Selanjutnya, tiba-tiba ada pengukuran, dan mereka memberi iming-iming uang 40 juta rupiah per hektar. Dalam pengukuran tersebut, mereka memberikan bukti untuk penyewaan padahal jika dicermati itu penyerahan tanah. Banyak warga desa buta huruf, hal itu yang dimanfaatkan oleh investor. Tambak yang akan beralih menjadi tambang tidak menjamin kesejahteraan rakyat akan tetapi akan menjadi bencana.

Kita hanya mencegah dan melakukan penghijauan, akan tetapi mereka sudah mencabuti semua tanaman penghijauan karena alasan tanah tersebut sudah diserahkan. Tapi kita tidak pernah lelah karena mereka tidak lelah merusak lingkungan kami. Tambang itu akan merusak lingkungan, persawahan, dan ekonomi masyarakat. Dan untuk alternatif perekonomian untuk kaum perempuan, kami membuat kerajinan dan olahan pesisir selatan seperti kerang hijau, Dll.

**\*Moderator memberikan catatan atas paparan dari 3 perwakilan warga.**

*KLHK*

Ini hari yang menyenangkan bagi saya dan membanggakan karena bertatapans langsung dengan teman-teman sekalian. Dirjen saya meminta maaf karena tidak bisa menghadiri langsung acara ini.

Ibu-Bapak sekalian kami dari KLHK punya mandat yang jelas. Kita ada 7 UU yang menjalankan lingkungan, UU sampah, sampai ke UU tindak pidana pencucian uang. Sampai detik ini satu-satunya yang berkecimpung pada ranah penegakan hukum hanya KLHK.

Ada 7 tipologi kasus, illegal logging, kebakaran hutan, TSL, pencemaran lingkungan, illegal mining (kalau dilakukan dikawasan hutan). Kalau ada pertambangan dikawasan hutan kami bisa masuk, kalau mereka tidak punya ijin lingkungan kami juga bisa masuk. Seperti di Bangka Belitung dengan putusan 3,5 tahun dan alat beratnya disita. Kita juga punya instrumen untuk sanksi administrasi mulai dari teguran dan pencabutan ijin. Sanksi administrasi yang tidak monumental mengenai reklamasi di pantai Utara. Kita ada gugatan perdata untuk pemulihan lingkungan sekitar 18 gugatan dan yang inkra 8 kasus, sisanya belum. Tujuannya ganti rugi negara dan pemulihan lingkungan.

Saya mendengar kegiatan tambang tidak berijin, salah satu kewenangan KLHK untuk menegakkan lingkungan dan kehutanan. Asal itu masuk kawasan hutan. Kami sudah berusaha, sedangkan Indonesia luas, sedangkan KLHK kekuatannya terbatas.

Kita hanya punya 1000 personil, mulai dari polisi hutan dll. Tidak mungkin tertangani secara tuntas setiap ada kasus, pengaduan juga banyak ditempat kami. Untuk membikin jera kita mengajak penyidik dari kementerian lain. Untuk pertambangan ilegal sebenarnya kita akan diskusi minggu depan. Insya Allah yang datang dari pajak, dll. Kalau berbicara soal tambang tidak jauh dari modal besar. Kalau ada orang yang dipenjara 5 tahun. Tidak apa-apa karena uang mereka masih banyak. Tapi kalau dimiskinkan mereka kan mikir. Bulan kemarin saya dan dirjen sudah menjadi saksi ahli. Itu kira-kira pandangan yang kami lakukan terkait tindak pidana hukum.

Kedua, terkait Permen bahwa masyarakat yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa digugat secara pidana dan perdata atau tidak bisa dikriminalisasi, ini kan mau diatur dalam peraturan menteri, di UU kan ditulis pejuang lingkungan, lalu ada kriterianya, sanksi, terus civil society, itu tahap diskusi yang berat.

Terakhir minggu kemarin khusus forumnya hakim untuk memberikan pendapat. Pendapat beliau tidak melebihi apa yang dimandatkan UU dan Permen segera difinalisasi. Agar MA bikin keputusan untuk mengatur hakim.

Yang krusial itu apa kriteria pejuang lingkungan dan apa bentuk perlindungannya? Kalau saya jangan sampai pejuang lingkungan dikriminalisasi. Kalau LKH bisa menjadikan, asalkan memperjuangkan lingkungan jangan dikriminalisasi. Pertauan menteri KLHK tidak bisa secara tegas mengatur kementerian yang lain. Kita sama sama akan mendorong terus untuk penegakan hukum.

#### **KEMBALI KE MODERATOR**

##### **Bagaimana jika terjadinya perusakan di luar hutan?**

KLHK: Diluar kawasan hutan bisa, tapi apabila ada ijin lingkungannya atau bukti perusakan lingkungan.

*KKP*

Kami pernah didatangi mas Rere terkait kasus teman-teman Banyuwangi, kemudian Dirjen kami menerima. Cuma kasus yang diajukan permasalahan pertambangan. Sementara persoalan ekstaktif persisir kan banyak, sedangkan di kami adalah di sumber daya ikan. Para illegal fishing karena sudah kapok kapalnya ditenggelamkan. Karena potensi mencuri ikan akan ditangkap dan ditenggelamkan.

Kembali ke persoalan yang dihadapi kita sangat menghargai diadakannya Jambore Perempuan. Dimana perempuan juga berperan aktif seperti laki-laki. Apa yang disampaikan ke tiga orang tadi belum masuk ke ranah kami. Karena kasus yang disampaikan di Tumpang Pitu, ada masalah di kelautan.

Setelah pengaduan, saya mengirimkan tim tapi sebagian orang disana mendukung tambang. Dan katanya warga banyak menerima manfaat dari tambang. Apabila delik aduan tentang lingkungan kita kordinasi dengan KLHK dengan ditunjang bukti-bukti.

Kalau kegiatan ekstraktif pasti akan menimbulkan kerusakan. Nah pemerintah mengelola dampak dari tambang tersebut dan batas-batas yang bisa ditoleransi. Batas-batas yang di toleransi ada dijelaskan di dokumen amdal. Jadi yang kami dapatkan kadang-kadang telah terjadi tapi masih batas-batas masih bisa ditoleransi. Dalam hal ini KKP masih melihat kasus yang disampaikan masih diranah lingkungan hidup. Jadi kewenangan kawan-kawan KLHK disana. Ini mungkin lebih dialami. Untuk yang di Porong kasus tidak kita yang menangani tapi kita menangani pulau yang kena bencana dan kita ubah menjadi pulau lusi. Kita bikin ecowisata bahari. Sayangnya beberapa kali saya kesana tidak ada yang tinggal di Tlocor, apalagi di pulaunya. Disana ada penjaga dua orang untuk menjaga. Pulau itu harus kita jaga karena lumour-lumpur yang masuk dari sungai diporong agar bisa tersedimentasi dengan baik.

Kasus yang disampaikan tadi sepertinya tidak ada kaitanya dengan perikanan. Tapi tadi ada yang menyampaikan terkait pembuatan tambak. Tadi bilang tambak dianggap mebuat sengsara masyarakat. Apa karena yang mengola bukan masyarakat terus karyawannya dari luar akhirnya masyarakat tidak dapat manfaatnya? Tambak udang tidak bisa berkembang kalau jauh dari laut, karena ambil dari laut. Sehingga ada sirkulasinya.

## **KEMBALI KEMODERATOR**

*DIAN (PUSHAM UBAYA)*

Saya punya dua riset. Pertama mengenai Lapindo. Bakrie hanya mengasuransikan karyawannya saja disini). Dilain pihak kalau perusahaan itu cukup awas di hasil riset saya spot-spot gas mulai ada tahun 2000. Dulu tiba-tiba ada sawah gosong karena banyak gelembung gas. Tahun 2004 muncul gelembung gas tapi ini tidak diantisipasi oleh Bakrie. Kemudian terjadi ledakan. Hampir semua ahli geologi mengatakan ini disebabkan oleh manusia. Tapi tim geologi kita menyebutkan bencana.

Pada saat Kepres atau Perpes yang keluar tidak ada yang diberi kesempatan untuk pendamping bertemu dengan lawyers Lapindo, sedangkan masyarakat tidak mengetahui soal hukum.

Kemudian riset saya yang terakhir. Saya melihat Tumpang Pitu, sebelum ijin dikeluarkan ke Merdeka Copper Gold (holding company) itu memang dilakukan di hutan lindung. Di Bursa efek Australia ada pernyataan akan mendiskusikan terkait status dari hutan lindung ke tidak hutan lindung atau produksi. Disini berarti mengubah perda RT/RW. Setelah dipimpin oleh bupati dengan dua periode perda itu berganti menjadi hutan produksi.

Dulu saya masuk pantai Pulau Merah masih lewat galangan sawah, lalu pada tahun 2016 hutan tersebut sudah hilang. Satu hal saya mau mengomentari soal udang. Saya tau di BWI Selatan ada putaran arus menurut laporan nelayan. Dulu bisa dapat ikan satu perahu, sekarang harus berlayar sampai Jember untuk mencari ikan.

Karena setelah banjir lumpur tahun 2016 lalu, yang diperkirakan dari areal tambang, banyak ikan yang menghilang. BSI sempat membikin dam, salah satunya ambrol dan masuk ke laut. Tapi bagi saya yang penting ikan yang bertelur terdapat diputar arus. Ada responden saya dari Unpad mengatakan bahwa makrobentos disana sudah tercemar berat.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

*YEYEN ( HRLS FH UNAIR)*

Saya tertarik karena pernah melakukan riset mengenai ecofemenisme yang berkaitan dengan perlindungan hukumnya. Saya lihat tadi dampak terhadap perempuan dan laki-laki itu berbeda.

Saya banyak berbicara soal gender. Dan gender kaitannya dengan lingkungan baru kali ini. Melihat perjuangan warga Kendeng itu menarik. Kalau saya melihat dari UU dapat melihat hukum tertulis dan dapat diimplementasikan. Peraturan apapun itu ada baik dan buruknya. Kesetaraan gender dapat didapatkan secara adil.

Disini kemudian hasil yang ditemukan dari kasus Kendeng dan Molo, perempuan banyak aktif terkait mengklaim mengenai sumber daya alamnya. Saya melihat 3 pihak yaitu eksekutif, yudisial dan masyarakat. Disini pemerintah daerah tidak memahami arti penting lingkungan bagi perempuan. Kalau dari pendekatan ecofeminisme dimana dampak buruk diterima oleh perempuan, seperti persoalan air yang disebabkan kerusakan lingkungan. Disini ibu kita yaitu alam sedang dirusak. Sehingga mengalami kesukaran air. Saya berfikir tidak bergerak disini nanti selanjutnya saya menjadi korbannya. Dari pengadilan pun tidak responsif sampai terjadinya kriminalisasi. Kita adalah rekan bekerja bersama dengan laki-laki. Sehingga dari penelitian kami, bahwa dari penelitian pun ada memang jaminan kesetaraan gender yang substantif yang pada faktanya tidak tercapai. Sehingga diperlukan implementasi hukum.

## **TANGGAPAN DARI PESERTA JAMBORE**

*DAYAT BANYUWANGI*

Komentar saya, jika tambang tidak berijin KLHK bisa menindak. Kalau di Tumpang Pitu ada ijinnya. Tapi proses ijinnya itu ada pelanggaran. Sebenarnya itu yang harus dicari oleh KLHK. Kalau kekuatan KLHK terbatas libatkan masyarakat pak. Disitu masyarakat bisa menjaga hutan. Untuk pasal 66 nomor 32 tahun 2009, kalau menurut saya petani pun juga pejuang lingkungan. Kalau dikriteria nanti petaninya juga dikriminalisasi. Kalau kepolisian disana polisi bagian dari teror, tiap hari dikawal. Kemarin malam aja Polres banyuwangi ada 5 mobil untuk mengawal proses tambang.

Untuk pak Sapta dari KKP, pak Sapta dulu bilang untuk menghadapi mafia tambang itu ngeri-ngeri sedap. Saya petani melawan tambang itu nyawa taruhannya.

Masyarakat sekitar tambang banyak yang mendukung itu beda pak. Mari kita buktikan seperti voting pak, Padahal gunung sudah dipotong pak. Masak itu masih sesuai batas? Paling nalarnya tidak bertemu itu. Kata pak Sapta juga bilang dari bencana menjadi berkah, itu gimana maksudnya?

*MASMUNAH (PPNI)*

Saya mau Sharing tentang tambang. Di Jepara ada tambang pasir besi dan ada dikriminalisasi. Ada teman-teman perempuan dipanggil ke Polres terkait urusan tambang. Hal itu juga perlu pendampingan dari pemerintah terkait. Di Demak ada tiga desa yang tenggelam dan ada makam.

Mereka dipindah dan hanya diberi uang 700 ribu untuk memperbaiki perairan. Harapan mereka hanya mempertahankan kampung tambaksari. Hal itu terjadi karena ada pengurukan pantai Tanjung Mas Semarang.

Di Demak ada 31 perempuan nelayan dan sudah berKTP nelayan. Mereka bercerita ada 30 jaring yang hilang karena kena arak. Ada juga mesin mati ditengah laut. Dan mereka sempat berselisih dengan nelayan Jepara. Disaat belum mendapat kartu SUKA mereka belum mendapatkan perlindungan.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

*RISMA UMAR: WALHI*

Pejuang lingkungan untuk menyelamatkan ruang hidup itu bukan pekerjaan gampang. Melawan pihak yang menghancurkan itu tidak mudah. Memang tidak ada pilihan lain buat warga di Sidoarjo, Tumpang Pitu, dan Lumajang tidak ada pilihan lain untuk tolak tambang. Kenapa begitu? Seperti pernyataan Direktur Walhi Jatim bahwa perluasan industri tambang naik 500 %. Itu juga artinya bahwa ruang hidup rakyat akan mengalami ancaman serius. Ketika lingkungan hidup ini diserahkan korporasi yang terjadi adalah bencana.

Bencana itu terjadi karena aktivitas industri ekstraktif. Disini sumur hidup akan rusak, ekosistem akan rusak. Penghancuran seluruh sumber-sumber kehidupan disitu. Bahwa kalau di Indonesia ini terjadi salah satunya semakin tingginya selera pemerintah untuk memperluas ijin-ijin korporasi. Pemerintah atau negara semakin mperluas ijin.

Kita tahu betul apa yang terjadi di tiga wilayah tadi adalah pelanggaran hak konstitusional. Sepertinya negara menyediakan pelanggaran HAM, hak lingkungan hidup, salah satunya Lapindo yang sudah terbukti. Apakah calon presiden dan presiden mau menyelesaikan masalah Lapindo? Tuntutan corporate accountability adanya kongkow-kongkow. Saya harap presidennya berani dong. Jadi tidak ada pilihan lain, pemerintah menyelesaikan kasus Tumpang Pitu. Itu jelas kepentingan politik. Dan jelas-jelas dampak lingkungan akan bermasalah. Jadi meningkatnya



perluasan industri ekstraktif akan jelas membawa bencana serius. Penghancuran posisi perempuan. Kita tahu perempuan tidak bisa dipisahkan dari lingkungan. Kalau lingkungan rusak maka akan terjadi marjinalisasi perempuan. Jadi pertahankan yang ada, rawat apa yang ada tapi jangan lupa kita menuntut hak atas lingkungan yang sehat, hak sipol. Kami sangat mengapresiasi atas proses perlingungan terhadap pejuang lingkungan, Tapi perusak lingkungan juga butuh sanksi. Dan ini perlu ditindak lanjuti.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

### *MERAH JOHANSYAH*

Terimakasih sudah menyampaikan data-data. Memang industri ekstraktif merupakan racun. Kita tahu perempuan adalah kelanjutan generasi. Peracunan yang dilakukan merupakan bunuh diri dan menghancurkan peradaban. Saya akan menjelaskan peristiwa mengenai bendungan pertambangan yang dimiliki perusahaan Brazil itu jebol.

Sehingga lingkungan di sekitarnya kena paparan racun atau logam berat. Perluasan industri ekstraktif ini sudah masif dan 44 % sudah dikuasi konsesi-konsesi pertambangan. Seperti pasir besi, gas, batubara. Dan perluasan ini mempersempit ruang hidup.

Kosakatanya selalu dengar kerangka waktu yang diperjuangkan adalah mengenai generasi. Kalau pemerintah kita kerangka pikirnya pada anggaran. Jadi kerangka waktu yang sesat. Sementara ibu-ibu pola perjuangannya kerangka waktu jangka panjang, yang diperjuangkan ini bukan hanya untuk perempuan tapi untuk laki-laki juga.

Tambang ini tidak hanya muncul di daratan. Sekarang ini muncul tata ruang laut. Hal ini terjadi karena kegagalan dari tata ruang daratan. Hal ini akan menambah ijin tambang. Sekarang pulau-pulau kecil Indonesia dikapling oleh pertambangan. Yang tidak pernah muncul juga evaluasi ijin-ijin Amdal.

Amdal ini kasusnya manipulasi. Dalam kasus Kendeng, Amdal copy paste dan memberikan keterangan partisipasi palsu. Mulai dari dulu ampai sekarang tidak ada partisipasi. Ijin-ijin tambang itu hanya DPRD, pemerintah yang memutuskan, tidak hasil dari masyarakat.

Banyak sekali peraturan yang dibuat untuk menguntungkan korporasi beroperasi. Disini beranikah pemerintah mencabut ijin tambang yang ada? Sampai saat ini ijin pertambangan dan mineral 900 ijin. Jadi setiap Pilkada pemilihan Gubernur, sumber dana mereka kampanye dari ijin-ijin tambang ini. Jadi warga tidak menerima manfaat melainkan persoalan.

Mereka hanya berbicara kewenangan. Misal KKP tidak mau melanjutkan apalagi tidak sesuai bagiannya. Nah tambang ini adalah industri maskulin, yang akan merampas

lahan masyarakat. Bakri yang disebut-sebut, di Kalimantan juga ada perusahaan tambang Bakrie. Jadi penjajah ini berkonsolidasi. Tambang Tumpang Pitu yang dimiliki Sandiaga Uno juga ada perusahaan di Kalimantan. Mengenai pasal 66 harapannya yang kita dorong adalah Kepres yang berkaitan perlindungan terhadap pejuang lingkungan hidup. Jadi harapannya pemerintah tidak bekerja sendiri-sendiri. Upaya pemulihan ini juga harus dilindungi. Kawan-kawan di pulau Bangka mengungat perusahaan tambang besi dan kawan-kawan menang. Kendeng sebenarnya juga menang. Terakhir apa yang harus dilakukan pemerintah kita sepakat harus adanya moratorium peraturan yang merusak lingkungan dan melanggar HAM.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

*HENDRO SANGKOYO*

Kita hidup di ruang hidup yang sedang di siksa. Pulau lumpur yang diucapkan tidak menyedihkan. Di atas tanah nenek moyang, dengan teganya menghina dengan proposal terkait pembuatan batu bata dari lumpur Lapindo.

Hari ini kita bukan saja menyaksikan dan meneguhkan perjuangan kita, tetapi kita tegak dan tidak kalah. Besar kecilnya pulau dirusak tanpa diperdulikan. Ditengahnya ada peran perempuan yang tidak bisa digantikan.

Boleh kita menundukan kepala kita untuk menghormati kepada teman-teman kita yang ada disini. Saya ingin menyampaikan penghargaan khusus kepada anaknya pak Salim Kancil, ada Mbak Har yang bikin kolam lobster. Dan saya ingat pernah ngobrol sama anaknya pak Salim. Malam terakhir sebelum bapaknya dibunuh beliau bilang, sebenarnya kita malu sama bung Karno, semua tanah atau pulau diurus sendiri, Kita cuma hanya mengurus.

Mereka yang terbunuh jangan pernah takut. Yang kedua dari teman-teman banyuwangi sama. Memang luar biasa pulau Jawa ini. Saya kira kenapa perempuan muncul kali ini. Semua warga bumi laki-laki sasaran paling nyata digelombang kali ini. Tetap kan hati jangan pernah lepas dari kampung.

Sekali lagi saya menyampaikan hormat kepada teman-teman semua, mari kita lanjutkan perjuangan ini bersama-sama.

## **MERESPON PERTANYAAN**

*KLHK :*

Saya mendengarkan diskusi Mbak-mbak didepan. Saya miris dengan ini. Negara itu pada intinya tidak ada rakyat tidak ada negara. Saya sebisa mungkin dalam melaksanakan tugas saya amanah. Saya sebagai warga, saya juga akan memperjuangkan hak - hak hidup masyarakat. Jadi saya bangga bisa duduk disini dan saya ingin berpartisipasi aktif. Tujuannya sama, ingin menuju lingkungan hidup yang sehat. aya juga berupaya dalam ranah hukum. Maka dari itu berkolaborasi

dengan civil society dan kementerian lain juga dilakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi semuanya. Bener kata-kata teman semua tadi. Di dalam ijin ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Itu harus dilakukan untuk meminimalisir dampak. Dalam proses Amdal ada hak dari masyarakat untuk menyampaikan.

Sampai-sampai UU lingkungan banyak diprotes dari kementerian karena banyak membatasi terkait ijin usaha. Kami disini mengawasi dan menindak lanjuti atas tidak taat. Kalau disitu ada proses usahanya kita tidak berwenang disitu.

Bahwa dalam proses Permen sangat dibatasi oleh aturan. Dan PP oleh KLHK juga di batalkan oleh MA. Jadi sebenarnya betul kata pak Merah paling ideal tidak hanya di Permen tapi di Peraturan Presiden.

*KKP:*

Jadi kalau program-program KKP ini 80% untuk masyarakat. Jadi ini bertolak belakang dari apa yang teman-teman sampaikan. Jadi ada target SUKA tidak tercapai, karena saat dicek suaminya dilapangan, suaminya tidak mau ikut asuransi apabila suami celaka istri dan anaknya yang mendapatkan.

Yang kedua pak Hidayat, kenapa ngeri-ngeri sedap pak, waktu Dirjen saya menstop pertambangan itu kelompok MMG dituduh datang menggunakan kapal perang. Jadi tidak hanya kalian yang dikriminalisasi jadi kita juga dikriminalisasi.

Semua perekonomian pesisir diseluruh dunia mengalami penurunan ekosistem. Makanya program buk Susi dimana nelayan dapat melaut. Sekarang produktifitas ikannya meningkat. Tapi masyarakat kita belum bisa membentuk korporasi untuk membentuk kapal besar.

Buat buk Yeyen terkait perempuan setara, mungkin ibu neliti disitu mungkin bisa. Kami pernah melakukan penelitian di 10 Provinsi. Dari masing-masing pengurus harus ada perempuan agar bisa melakukan aspirasi. Dan menambah pendapat kepada ibu-ibu dan tabungan bisa membeli beras.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

Jambore disini tidak hanya untuk berkeluh kesah tapi untuk memberkuat konsolidasi perlawanan.

## ***SESI DISKUSI TEMATIK I: PEREMPUAN, PATRIARKI, DAN PUSARAN INDUSTRI EKSTRAKTIF***

Moderator: 900 Ha yang sekarang menjadi kubangan lumpur Lapindo, dulunya adalah kampung. Dan sebagian besar aset tanah tersebut adalah hak waris perempuan. Akan tetapi dalam penyelesaian kasus Lapindo, perempuan tidak pernah diajak untuk diskusi.

***MTAK HAR:***

Dalam kasus Lapindo, aset tanah dipegang oleh perempuan. Laki-laki hanya menantu. Kasus Lapindo ini bisa diambil beberapa pelajaran.

“Kita bisa belajar: perempuan mengendalikan ekonomi rumah tangga. Walaupun tidak bekerja di luar, akan tetapi perempuan bisa menanam untuk beberapa kebutuhan rumah tangga. Hal itu bisa membantu perekonomian rumah tangga”.

“Dalam kasus lain, bagaimana perempuan bisa di depan”. Soal ganti rugi, perempuan tidak dilibatkan. Dalam kasus ganti rugi, laki-laki malah yang dilibatkan.

Dalam beberapa kasus: hal tersebut membuat perempuan berada dalam posisi yang jauh dari kesadaran politik. Lewat jambore ini saya berharap perempuan menjadi cerdas dalam membaca beberapa situasi yang menjadi hak kita: pendidikan anak, dll.

Moderator: seperti apa peran yang harus di dapatkan?

***MTAK HAR:***

Peran perempuan dalam kasus Lapindo ini, perempuan tidak punya hak sipil dan politik. Kami sempat mendatangi beberapa kementerian. Tapi mereka bilang kami tidak punya wewenang.

Saya lalu mengumpulkan beberapa perempuan. Lalu saya tanya, apa yang menjadi kebutuhan mendesak: para perempuan menjawab: kesehatan.

Yang dulunya takut masuk kantor desa dan kecamatan dengan melepas sandal, akan tetapi dengan beberapa proses mereka mulai tidak melepas sandal lagi.

Selanjutnya berbekal pengetahuan, kami mulai masuk lewat keterbukaan informasi publik untuk mendapatkan data kesehatan yang kami butuhkan. Selain itu terkait isu lingkungan, kami belajar riset tentang situasi lingkungan disini.

***OLIN:***

Siapa yang baru kenal Mbak Har? Nah tadi ada beberapa yang belum saling kenal. Ini namanya mbak Har-premanya Porong.

Saya sudah menyaksikan sendiri, dalam prosesnya, saya melihat Mbak Har, di posisi yang paling susah: Waktu kejadian Lapindo: lagi hamil anak kedua, suami sakit.

Dampak tambang yang saya lihat dengan kasus Lapindo ini adalah; ekonomi, sosial, psikologis.

Dari catatan riset yang saya lakukan, saya menemukan:

Fase pertama: satu proses yang cepat dalam penghilangan semuanya.

Fase kedua; dimana ada kesimpulan bahwa ketidakastian kapan umpur akan berhenti. Dengan demikian bencana akan terus datang. Jebakan ekologis, dimana semua tidak bisa hidup lagi.

Ada serangan sampai pada ke tingkat tubuh. Karena banyak menderita akhirnya sakit yang bisa membawa ke kematian. Di saat- saat seperti itu gak ada perawatan profesional. Harusnya ada perawan kesehatan mental profesional. Dan ternyata masyarakat disini tingkat kelenturannya bisa bertahan, dari tingkat bawah menjadi bangkit lagi.

Untuk mencegah itu terjadi, atau mengalami sesuatu jangan takut berbagi kepada orang lain.

Harus dicek siapa yang melanggengkan penderitaan ini? Apakah saya kurang usaha? Oh ternyata saya memang gak mungkin bisa kaya, karena ternyata ada sistem tertentu yang melanggengkan itu.

Adanya sistem patrirkarki, sistem itu dibuat langgeng supaya dibuat banyak.

Moderator: bagaimana hubungannya bahwa suatu lingkungan rusak, kenapa perempuan yang dianggap menanggung sebesar itu? Ada apa sebetulnya?

*ALIN:*

Kenapa industri ekstraktif itu industri yang patriarkis? Pembangunan di Indonesia wajahnya memang patriarkal. Dengan dalih kesejahteraan rakyat. Faktanya pembangunan ini wajahnya menindas. Karakter industri ekstraktif adalah industri yang eksploitatif. Karakter eksploitatif itu adalah karakter patriarki.

Karakter lainnya, yaitu memarjinalisasi alam, meminggirkan alam dan ekosistem. Dalam pendekatan ekofeminisme, bumi disimbolkan dengan ibu. Kenapa perempuan mengalami depresi terus menerus, karena ada yang sedang dicabut nafasnya. Jadi ketika memarjinalisasi alam, sebenarnya sedang memarjinalisasi sumber-sumber kehidupan perempuan.

Lainnya, menggunakan teknologi dan pengetahuan. Pengetahuan dan teknologi moderen dijadikan alat untuk melakukan penyingkiran. Sebenarnya pun ga sekolah pun bisa buat mendeteksi kalau ada kerusakan-kerusakan alam.

Lainnya, menggunakan kekerasan. Militaristik. Apa yang terjadi pada pak Salim Kancil adalah pendekatan kekerasan. Militaristik bukan hanya tentara tapi juga polisi, preman itu menggunakannya. Itu yang dilakukan oleh industri ekstraktif.

Itu semua yang terjadi pada watak patriakal. Sebenarnya yang paling bahaya adalah bukan hanya tentang dampak. Ketergantungan kita terhadap satu komoditas tambang sampai mempengaruhi kontrol terhadap tubuh kita. Kita tidak bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan. Ini tidak kalah berat dengan dampak langsung yang dialami oleh masyarakat akan industri.

Korporasi menggunakan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat, seperti ketidakadilan gender. Itu kenapa penderitaan perempuan berlapis-lapis ketika datangnya industri.

#### *DEWI: SOLIDARITAS PEREMPUAN*

Bahwa perubahan bisa terjadi ketika bergerak kolektif untuk mendapatkan kedaulatan sebagai manusia, sebagai rakyat dan sebagai perempuan, salah satu hal yang perlu didorong bahwa ini bukanlah persoalan kita sendiri. Perjuangan perempuan itu berlapis-lapis.

Pertama, kita punya tantangan sistem sosial yang masih belum mengakui melindungi posisi perempuan. Perempuan berjuang itu berjuang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk keluarga untuk komunitasnya. Perjuangan perempuan itu mengubah sistem di tingkat keluarga, di tingkat sosial, di tingkat pemerintah.

Hilangnya ruang perempuan punya implikasi juga terhadap peningkatan beban perempuan. Harusnya bukan hanya melihat pada pemulihan psikologisnya, tapi juga pemulihan ruang sosialnya, ekonominya.

Kita perlu memperkuat ruang-ruang konsolidasi kita. Seperti yang terjadi diantara perempuan seperti gosip. Lalu bagaimana kita membuat gosip-gosip ini atau ruang-ruang ini lebih bermakna. Kita rebut ruang itu untuk menyusun strategi yang ingin disuarakan bersama.

Ketika kita bisa bergerak bersama dan terus menyuarakan, maka perubahan akan terjadi. Bagaimana kita sebagai perempuan menjadi pemilih yang cerdas. Tidak dijadikan alat politik. Kita meletakkan agenda kita yang seharusnya menjadi agenda para kandidat.

#### *RUMI MOJOKERTO*

Kami perempuan Lakardowo, kami korban dari limbah pertambangan yang dibuang dan ditimbun di desa kami. Mulai dari 2010. Dan tahun 2016 kita sudah merasakan. Ijinnya pengolahan limbah B3. Ternyata hanya untuk menimbun. Kami kalau sore sering melihat aktivitas mereka. Mulai 2016 terasa dampaknya, ada sekitar 300 orang mengalami gatal-gatal dan ispa. Akhirnya kita inisiatif untuk mendatangkan air dari luar desa. Bagaimana menjadikan air yang tercemar bisa digunakan lagi? Untuk Mba Har bagaimana mempertahankan perjuangan perempuan?

#### *BUKAS-PULAU PARI*

Lebih ditingkatkan dalam menyebarkan informasi apa yang terjadi pada ibu-ibu. Menggunakan medsos untuk kampanye.

## ***SESI DISKUSI TEMATIK II: ENERGI KOTOR DAN MATA RANTAI KRISIS***

Moderator: Sampai saat ini bagaimana perkembangan PLTU di Batang? Siapa pemodalnya? Bagaimana proses berdirinya? Gambaran umum masyarakat di sana dalam merespon ini bagaimana?

### ***USMAN-WARGA BATANG***

PLTU di Batang ini terbilang paling besar sekitar 20000 MW. Nelayan menolak, bukan karena tidak setuju pemenuhan kecukupan listrik. Tapi karena kita tahu bahwa PLTU ini merusak ekosistem laut. Pasti akan merusak pendapatan kami. Hal ini tidak mudah.

Bertahun-tahun memperjuangkan sejak 2011 sampai sekarang, sekitar 7 tahun lebih dan belum berhasil. Malah pembangunan semakin masif dan sudah mencapai sekitar 50% lebih. Sudah mulai berdatangan kendaraan yang membawa batubara. Investor disana berasal dari bank internasional dari Jepang (JBIC). Pemuda mengadu pada investor terkait kerusakan-kerusakan yang sudah dialami selama ini. Meskipun belum beroperasi tapi kita sudah mengalami dampak kerugiannya.

Dari berbagai kegiatan disana, keberhasilan yang dihasilkan ada andil besar dari perempuan. Seperti saat ada kegiatan, saya melakukan pembagian wilayah di beberapa dusun. Masing-masing wilayah itu ada koordinator, 3 dari 4 wilayah itu dikoordinatori perempuan. Dan yang berhasil justru yang dikoordinatori oleh perempuan. Kenapa di acara ini perempuan masih belum bisa datang, itu karena budaya yang masih mengikat. Seperti masih dibatasi geraknya oleh keluarga. Hanya masih bisa bergerak sampai tingkat desa.

Perusahaan yang terlibat adalah hasil konsorium dari 3 perusahaan yang katanya milik pak Sandiaga Uno. Kita mendatangi posko milik dua pasangan paslon petahana. Ini untuk menantang kedua paslon apakah berani menjadi pahlwan kita. Apakah berani membantu kita untuk menjaga lingkungan demi anak cucu kita.

### ***EKO-WARGA CELUKAN***

Masalah kami adalah masalah PLTU. Pembangkit listrik yang menggunakan batu bara. Sebelumnya ada PLTU 330 MW. Dan kami memang kecolongan itu. Sekarang akan ada PLTU berkekuatan 660 MW. Ada 4 desa terdampak dan disana tidak ada sosialisasi adanya pengeluaran AMDAL. Sementara pemerintah mengatakan bahwa disana adalah lahan kosong sehingga itu tidak akan berdampak. Sementara yang kami bela adalah lingkungan. Ujung-ujungnya dalam sidang akhir, dimenangkan oleh pihak tergugat.

Mereka menyewa pengacara terkenal, Hotman Paris. Pengacara kita LBH Bali. Untuk saksi adalah dari masyarakat, saya sendiri. Dia mengancam pada saya, bahwa jangan

sampai memberikan kesaksian palsu. Padahal kami berkaca pada PLTU yang berkekuatan 330 MW.

Investor ini berasal dari China. Seluruh manajemannya berasal dari garis keluarga mereka semua. Kebutuhan Bali akan listrik secara puncaknya hanya butuh 800MW, padahal Bali sudah menghasilkan 1000MW perhari.

Ada nenek Karimun, ia masih bertahan sampai sekarang di lokasi pembangunan. Andaikata nenek Karimun itu bisa tergusur pasti pembangunan sudah dimulai. Kunci utama adalah mengalahkan keputusan berkuasa dan uang-adalah solidaritas masyarakat. Ada satu dusun tergusur, dan itu berkali-kali. Satu desa kami, ada pabrik semen, PLTU, bahkan nanti ini akan ada perusahaan energi gas.

Menurut kabar wilayah kami sudah menjadi wilayah industri. Dampaknya sudah terasa, Hotman pernah bertanya apa dampaknya semenjak ada jeti. Saya jawab, disana sebelum ada PLTU, kami adalah masyarakat nelayan, duu hanya cukup dayung. Dengan jaring itu ikan sudah melimpah ruah. Tapi dengan adanya jeti ini kami harus mengeluarkan biaya berlimpah, harus pakai mesin, harus ke tengah.

Biaya operasional kami bertambah daripada sebelum ada jeti. Kami harus ke tengah lautan dan itu belum tentu dapat. Dan ngerinya, cairan limbah langsung dibuang ke laut. Kemarin ada petani rumput laut mengadu, semenjak ada PLTU panennya berkurang.

Moderator: energi ini sangat kotor. Bukan hanya kotor dalam lingkungan tapi juga ekonomi, sosial dan politik. Ada hasil laporan yang menggemparkan dari Greenpeace dan Jatam dan ICW yaitu coal corruption. Seperti apa sebetulnya peta mata rantainya? Dan siapa sebetulnya yang ada di belakangnya?

#### *HINDUN: GREENPEACE*

Hampir semua PLTU di Indonesia berasal dari Kalimantan dan Sumatera. Di Kalimantan Samarinda sudah ada 31 anak meninggal di lubang tambang. Itu dekat dengan perumahan, anak-anak desa. Fly ash yang ada di batu bara mengandung merkuri. Kalau kita bicara tambang, lubang-lubangnya hanya didiamkan dan tidak direklamasi.

Jadi air yang di danau berasal dari lubang tambang, warnanya bagus dan indah seperti biru hijau, tapi memiliki kandungan yang berbahaya, itu bisa bocor. Bisa ke sungai, bisa ke air tanah. Padahal air itu kebutuhan masyarakat. Hampir 71% sungainya berpotensi tercemar pertambangan batubara. Yang rugi pasti kehidupan rumah tangga itu sendiri.

Kenapa masyarakat harus menyatu, karena masalahnya sama, pemiliknya juga itu-itu aja. Ada banyak petani dan nelayan yang mengalami kerugian. Petani kehilangan lahannya. Masyarakat di sekitar pertambangan hidup di tengah-tengah kualitas air yang tercemar. Terdapat 3033 lubang tambang terbengkalai, dan 2600 nya ada di Kalimantan.



Apa saja yang dikeluarkan dari pembakaran batu bara? Pm2,5, merkuri, cO2, NO2 dll, semua itu berbahaya. PM2,5 ini sangat kecil sehingga tidak tersaring. Masuk ke pembuluh darah. Dan membawa dampak yang buruk. Ini yang paling merasakan dampaknya perempuan dan anak-anak. Apalagi ibu hamil. Sekarang banyak sekali ibu yang mengandung ke dokter kandungan dinasehati untuk pakai masker agar tidak terpapar polusi, apalagi warga yang terdampak udara yang sudah sangat tercemar. Kita ingin masyarakat menyadari isu kerusakan akibat energi kotor lebih banyak lagi.

1 PLTU yang beroperasi, membakar batu bara. Emisinya bisa tersebar sampai 100 km. Ternyata pemain besar di bisnis pertambangan batu bara di Kalimantan juga punya perusahaan PLTU. Ia menguasai industri dari hulu ke hilir. Dan mereka adalah yang membuat kebijakan.

Sistem ini dikuasai oleh yang punya uang dan kekuasaan. Kita harus punya narasi besar. Yang kita tolak adalah energi kotor, bisnis kotor dan politikus kotor. Politikus kotor ada di pemerintahan, pemilik bisnis kotor. Disini kita mulai menemukan keterhubungannya sehingga dapat menyusun rencana bersama.

Moderator;

Dunia ini dikuasai oleh kapitalis. Kenapa Cina sekarang secara energi bagus sekali. Mereka membuang energi kotoranya. Mereka membuat listrik dari matahari dan menutup PLTUnya. Sebelumnya Cina sangat kotor udaranya. Cina mengalami krisis ekonomi, dan kita kena dampaknya. Hal ini berupa investasi yang mereka lakukan di indonesia.

**Hari II: 15 Februari 2019**

**Metode notulensi: Verbatim**

***SESI DISKUSI TEMATIK III: INDUSTRI EKSTRAKTIF DAN PELANGGARAN HAM***

*IKE NURILAH (LUMAJANG)*

Saya ingin bercerita keadaan tahun 2015 mengenai penambangan ilegal. Pas kehadiran preman di rumah, saya masih mencari rumput, kira-kira pukul 7 pagi ada beberapa orang yang membawa almarhum dan menganiayanya didepan rumah sampai balai desa.

Mereka menganiaya pakai cangkul sampai meninggal. Otak pembunuhan adalah lurah sendiri. Setelah setahun peristiwa itu warga membentuk kelompok Laskar Samudera untuk pemulihan bekas penambangan dengan melakukan penghijauan. Di pertengahan tahun 2018 ada masuk investor lagi. Warga tiba-tiba mendapat undangan di balai desa tanpa stempel. Pada hari itu mereka membikin kesepakatan, tapi banyak orang yang menolak.

Dalam waktu seminggu investor mendatangi satu kesatuan untuk menyerahkan tanah mereka. Mereka (warga) kebetulan tidak paham huruf. Kades sempat berdebat sama pihak tambak terkait undangan. Mereka seperti ilegal.

Mereka saling menyalahkan karena undangan. Kenapa ada patok itu batas tanah olor dan Perhutani. Setelah kasus selesai mematok tanah olor dan tanah perhutani. Setelah itu berlalu kami dan kawan-kawan Laskar Samudera mulai menanam kembali dengan penghijauan.

Saat menanam penghijauan ada yang bilang “jangan menanam disini” karena sudah laku. Padahal lahan itu untuk anak cucu kita nanti. Apabila disana dibangun tambak, maka akan ditinggikan. Setelah itu di Selok mulai penggarapan. Karena Selok Awar-awar dan Selok Anyar ada dua kepala desa. Mereka ingin mengeruk dari selatan ke utara untuk membentuk tanggul. Seandainya tanggul dibuat kalau air laut naik pasti akan hancur.

**KEMBALI KE MODERATOR**

Disini ada manipulasi terkait ijin tambak padahal tambang.

*RATNA (BANYUWANGI TUMPANG PITU)*

Di Banyuwangi ada pertambangan emas besar kedua setelah Freeport. Maka kami disana menolak adanya pertambangan. Kalau disana ada pertambangan pasti ada racun sianida. Padahal tambang dan rumah warga tidak ada jarak sama sekali. Rumah saya pun berada dikaki gunung tumpang Pitu.

Disana juga terkenal dengan pantai Pulau Merah. Pasti dengan ada pertambangan ada dampak-dampak yang ngeri. Saya juga perempuan petani buah naga. Disana tanpa pertambangan kehidupannya pun sudah lebih maju.

Tapi kenapa pertambangan kok masih tetap berjalan disana. Sedikit cerita saya menolak pertambangan Tumpang Pitu. Saya ini disana dikriminalisasi atas kasus penyebaran ajaran komunis. Padahal saya juga kaget apa sih komunis. Padahal saya cuma menulis spanduk sesuai apresiasi warga.

Tiba-tiba ada logo yang mirip palu arit di spanduk. Ternyata disitu ada spanduk selundupan. Dua hari setelah itu saya dipanggil ke Polres untuk menjadi sanksi. Satu minggu setelah jadi saksi ada surat turun untuk saya dan menjadi tersangka.

Setelah itu saya dipanggil lagi. Lalu saya mengatakan ke penyidik, kenapa saya menjadi tersangka kan spanduknya awalnya dibawa orang lain? Polisi menjawab kan tersangka belum tentu salah.

Kita besok tanggal 17 akan mengadakan workshop untuk membuat sabun dari buah naga. Jadi buah naga untuk dijadikan objek kegiatan ibu-ibu. Disana sekarang setiap selasa kliwon mengadakan aksi.

#### **KEMBALI KE MODERATOR**

Banyak perlawanan masyarakat yang dihadapkan dengan kriminalisasi. Upaya masyarakat melakukan perlawanan yang baik di ancam dengan kriminalisasi.

#### **PENANGGAP**

##### ***BAGYO: TEKAD GARUDA***

Saya kagum dengan ibu-ibu sekalian. Di Surabaya juga ada ibu-ibu yang kekuatannya luar biasa seperti perlawanan ibu-ibu, di Waduk Sepat. Saat waduk Sepat akan di eksekusi ibu-ibu berada di garda depan.

Seperti hal di Sukorejo, banyak ibu-ibu yang datang di pengadilan saat melawan. Kita ini secara umum menghadapi apa yang disebut tirani korporasi. Tirani itu semuanya sendiri yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Yang membentuk namanya perusahaan atau korporasi. Perusahaan ini dibentuk untuk membatasi mereka. Perusahaan dimana-mana kekuasaannya mendikte dan banyak memenangkan pengadilan saat ada perkara.

Hukum kita saja udah dikuasi oleh perusahaan. Biasanya perusahaan mengajak akademisi untuk merumuskan hukum yang mempermudah membuat peraturan. Nanti di sahkan oleh legislatif dan presiden, nah disini ada biaya kembali saat proses pengesahan peraturan.

Saya memberikan penghormatan sebesar-besarnya kepada orang yang berani melawan. Kita tidak boleh pesimis untuk melakukan perlawanan. Coba lihat kalau di Selok Awar kalau tidak ada yang melawan sudah habis mungkin sekarang, sebaliknya pun di Tumpang Pitu Banyuwangi. Gerakan lumpur Lapindo tidak begitu kompak karena ditunggangi oleh ketua-ketua yang dari warga sendiri. Dimana-mana perlawanan masyarakat akan menghadapi upaya pecah belah.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

*FRANKY (HRLS)*

Yang saya sampaikan disini sedikit berbeda. Di satu titik memang butuh kajian kembali tapi buat saya sendiri ada instrumen penegakan hukum terkait administrasi dan pidana. Banyak masalah dan tipu daya. Belum lagi kalau AMDAL itu disetujui. Sebenarnya masyarakat Tumpang Pitu ini diberi informasi tidak. Dan juga sebaliknya masyarakat Selok Awar-awar.

Kedua ketika banyak kasus di Indonesia dalam kasus perdata, banyak perusahaan yang tidak membayar. Jadi banyak kasus secara perdata dan pidana yang dilanggar.

Satu yang miris, kasus Nur Alam yang berkaitan SDA. Kasus di PN dan banding. Ketika memanggil Basuki Wasis, hakim tidak mempertimbangkan kerugian lingkungan. Saya mengusulkan bahwa kejahatan lingkungan termasuk dalam kerugian negara. Kita bagaimana caranya menyerang dengan cara legal, bukan dengan cara ilegal.

## **KEMBALI KE MODERATOR**

*KARTIKA KPK*

Ibu-ibu saya kenapa berbicara paling belakang. Karena sejujurnya saya tidak banyak pengetahuan dibanding ibu-ibu. Generasi kita ini sudah tidak adil. Karena sudah merampas generasi yang akan datang.

Jadi kalau kita melawan ya melawan aja bu. Melawan tetap cantik gitu bu dengan situasi sekarang belum tentu mereka lebih hebat. Ditempat kamu juga rentan kriminalisasi dan untuk mengkonstruksi kasus bisa sampai satu tahun. Kita coba melakukan pendekatan dan berbagi peran. Saya bekerja dengan cara KPK dan ibu tetap berjuang seperti cara ibu.

Ada kejadian di kawasan di Jawa Barat, yaitu kawasan hutan yang berganti jadi kawasan properti. Ada mekanisme perencanaan dan pengawasan harus membagi pengetahuan terkait peran masyarakat. Ini mungkin harus dibagi ke ibu-ibu lebih dalam lagi. Jadi tidak ada alasan untuk menolak apa yang kita sampaikan. Yang terakhir sebenarnya, kita hidup melawan hidup dan mati.

## **DISKUSI**

*IBU DARI PULAU PARI*

Gimana cara membuktikan terkait korupsi? Saya yakin bupati melakukan korupsi tapi gimana cara membuktikannya?

*KARTIKA KPK*

Bisa dilihat dari dana yang dituliskan di papan. Kita tidak menyarankan sebagai penyelidik KPK, cukup jadi informan saja. Karena disana banyak proyek yang menyangkut air bersih.

*UMI WALHI JATENG*

Terkait RT/RW itu menarik. Jadi di Jateng terkait tambang, daerah DAS, warga menolak tambang yang sudah eksis. Warga ingin menolak karena tanahnya sudah dimakan oleh tambang. Ada juga kita mengkaji terkait PLTU yang sudah disampaikan ke pansus, itupun Bapeda pun pesimis.

#### *KARTIKA KPK*

RTRW ini banyak tipu-tipu di pulau Jawa. Nanti kirim aja surat-suratnya ke KPK. RTRW ini harusnya mengambil pertanyaan dari masyarakat. Soalnya kadang dokumen detailnya tidak disampaikan. Makanya persoalannya mereka tidak menjelaskan daya tampung. Terkait dengan PLTU menjadi konflik, hitung-hitungan Jawa berkonflik terkait listrik.

#### *BAGYO*

Kita kan butuh partisipasi masyarakat, di negara demokratis. Yang penting itu justru mengawal pemerintahan yang sudah di pilih itu. Bapak ibu sekalian punya hak untuk mentrol itu. Misal RTRW nasional begini. Kita cari hal-hal yang keliru. Saya punya paradigma, untuk mengoperasikan hukum kita boleh memihak. Karena didalam hukum itu ada yang mengoperasikan.

#### *FRANKY*

Untuk proses RT/RW banyak masyarakat yang tidak dilibatkan. Kita bisa melihat selektif calon rakyat kita. Karena mereka lah yang nanti membuat peraturan daerah. Tapi memang susah. Mungkin kalau teman-teman bekerja sama dengan CSO dapat berdekatan dengan teman teman lain. Ada dua hal yang yaitu proyek nasional (mau tidak mau daerah harus tunduk) dan proyek atas dasar kepentingan umum.

#### *IDA PORONG*

Bukan pertanyaan tapi curhat saja. Kami sebagai seorang ibu dan sebagai pendidik ditingkat Paud. Disini air dan udara kami rasa sudah tidak sehat lagi, bagaimana nasib generasi bangsa anak didik nantinya. Tidak ada solusi permasalahan dari lumpur Lapindo tersebut. Sedangkan kita butuh generasi yang berkualitas. Orang dewasa aja banyak yang terkena kanker servis apalagi anak-anak. Terus apa yang kami lakukan.

#### *KARTIKA KPK*

Jadi lumpur Lapindo ada karnium yang nantinya bikin kanker tulang. Karnium itu masuk melalui ikan. Dan dimakan manusia. Hal ini seperti rantai makanan. Saya mengusulkan mungkin kita membangun perjuangan di level ...Kalau RPJMN bisa menjadi greenroot Insya Allah akan mengurangi permasalahan. Jadi penyusunan RPJMD tolong dikawal karena mereka kan membikin untuk kepemimpinan yang akan datang.

#### *BAGYO*

Sebenarnya ada teman yang melakukan itu disini. Jadi kita perlu bekerja sama dengan Puskesmas setempat dan dapat bekerja sama dengan laboratorium kampus. Insya Allah kita siap mendampingi.

*FRANKY*

Nah yang terakhir hak atas lingkungan sehat. Saya gak tau Sidoarjo punya dinas report dari dinas kesehatan, terkait temuan air di daerah.

**Ditutup Oleh Moderator**

Tambahan Nur Hidayat (Tumpang Pitu ): sebelum ada ijin produksi tambang Tumpang Pitu, Bupati Anas membikin perda RT RW yang meliputi..... Bupati Anas mengusulkan alih fungsi lahan. Sebelumnya hutan lindung, tapi dialih fungsikan untuk korporasi dan pemerintah sudah berselingkuh. Statusnya lindungnya dihilangkan. Mungkin KPK bisa masuk untuk menelusuri terkait kebijakan sesat pemerintahan disana.

*KARTIKA (KPK)*

Paling sulit untuk membuktikan terkait peristiwa hukumnya. Kami harus ada alat buktinya. Teman-teman kami tidak mudah untuk mengintruksikannya. Hal yang sama kita sampaikan ke teman-teman.

#### ***SESI DISKUSI TEMATIK IV: GERAKAN PEREMPUAN DALAM PENYELAMATAN DAN PEMULIHAN RUANG HIDUP***

*GUNARTI: KENDENG*

Tanah itu tidak untuk diperjualbelikan. Bukan sumber ekonomi. Lihatlah tanah sebagi sosok ibu. Bumi: ibuku (ibu kami). Di atas bumi ini semua mau diambil perusahaan. Aku tidak bisa menceritakan banyak. Tapi dampak pertama, yang jelas tahun 2009 Semen Gresik kalah. Tanah banyak terjual perusahaan tetap tidak bisa berdiri, karena kami kompak.

Di tahun 2008 belum pegang HP, walaupun murah. Tapi itu bukan alasan kita tidak bergerak. Apa yang telah saya lakukan belum seberapa dari apa yang bumi sudah lakukan. Apa yang sudah kita berikan ke ibu bumi?

Apa jika kita sudah bergerak sejak 2006, kita sudah berjuang? Bukan. Kita belum berjuang, itu belum impas. Ibu bumi selalu kita minta untuk anak cucu kita. Dimanapun ada bumi, itulah ibu kita, tanggung jawab kita bersama.

2009 menang, 2010 dua kecamatan yang dekat dengan kecamatan Sukolilo, Indosemen mengancam 2 kecamatan, saham dari Jerman perusahaan raksasa. Saya kemudian berkeliling dari desa ke desa. Yang tolak ada 25, berarti kita bisa kalah?

Saya bilang tidak, karena ini bukan pemilihan kepala desa. Kuantitas tidak menentukan menang tidaknya perjuangan. Kita sedikit untuk desa Kedumulyo. Banyak yang masih menolak di 7 desa itu, saya datangi satu-satu.

Satu saat ibu mau ketemu dengan ibu-ibu di desa lain? Tentu mau, dari desa ke desa, satu desa 5 orang, saya kadang datang ke yasinan ibu-ibu walaupun saya sedulur sikep.

Kadang saya juga takut karena ada isu, jika dekat orang Samin akan dipengaruhi, tapi prinsip saya satu, untuk ibu bumi. Kerukunan bisa terpecah belah karena persoalan ini, rusak sosial budayanya. Belum lagi jika ada pabriknya, ekonomi juga rusak, kesehatan.

Karena terdapat sumber mata air. Di Tambakromo, ada 30 sumber mata air dan goa dan dianggap mereka hanya 25. Waktu kami kalahkan Semen Gresik, mereka hanya menghitung 6 sumber mata air.

Sementara kami yang puluhan tahun disana tau persis dan nemu 49. kita sering aksi, tapi kalo bisa audiensi itu juga kita tempuh. Tapi pemerintah kadang sok berkuasa, padahal kuasa dari kita. Tanpa kita tak ada kuasa. Sampai saat ini dampak yang sedang kami rasakan khususnya di Rembang, kenapa sampai di pemerintahan, warga menang di MA, tapi pabrik lanjut beroperasi.

Saat-saat inilah, pemerintahan itu dimana, kok kita rembugan seperti gak didengar. Yoowis, kami kuatkan warga di lapangan, menegaskan kejujuran. Untuk di kecamatan Kayen dan Tambak kromo, mulai 2011 Bupati keluarkan ijin lokasi 148 hektar, milik warga diijinkan Bupati, warga menggugat 2017, ijin mereka habis dan tidak ada kegiatan apapun di lapangan. Belum ada kegiatan apapun.

Semeter pun tanahku, tidak akan saya jual, karena itu sama saja menjual hidup saya sendiri. Semasa 2008, Semen Gresik, ada 9 bapak-bapak tertangkap, warga Kendeng, Sukolilo, dll.

Bibit Waluyo seperti kebakaran jenggot, menanggapi: nggak usah demo, maunya apa? Kami minta penelitian bersama dan tidak boleh ada kegiatan apapun di pabrik. Tapi selang 10 hari, kami selalu buat pertemuan dan bagi informasi. Lalu ada mobil Semen Gresik beroperasi.

Ibu-ibu walaupun masih masak, langsung blokir. Saya kemudian ditelpon dan mengkondisikan di lapangan agar pak lurah keluar. Dan malah rumah pak lurah yang dijaga polisi. Sederhana, kami cuma ingin tau mobil ini aktivitasnya apa. Dan yang kemudian datang adalah mobil Brimob.

Ibu-ibu yang turun ke jalan. Sopirnya kita tawarin minum, kami tidak menyandera dan ingin pak Lurah keluar. Tapi tidak keluar juga. Sewaktu saya menuju rumah, ada mobil, dan ada yang ditangkap. 9 orang. Kita tidak semakin takut tapi semangat.

Setiap hari hampir 9 truk datang ke Polres. Akhirnya Polres yang ketakutan. Dipindah di Polda di Semarang. Pada waktu jalan saya mendongeng. Ada dongeng gajah sama semut. Gajah itu pak Lurah. Semut itu warga.

Ketika gajah injak semut, semua semut tambah semangat. Itu sama halnya yang terjadi, ketika 9 orang itu tertangkap dan keberanian ibu-ibu adalah ketika paham ibu bumi itu terancam.

Itulah langkah ibu-ibu. Walaupun kita masih punya PR memundurkan Indosemen. Bagi saya tetap kuatkan di lapangan, tanah jangan sampai dijual. Di atas kekuasaan Bupati dan Presiden masih ada ibu bumi.

Moderator:

Besar tekad perempuan sebagai penjaga alam. Perempuan terasosiasi dekat dengan alam. Tapi kadang, ada yang kurang sadar akan tanggung jawabnya. Pertanyaannya? Bagaimana pengorganisasian dilakukan ketika korporasi masuk?

*IKE-LUMAJANG:*

Ass..Wr.Wb. Kita itu melawan tidak gampang. Mengumpulkan juga tidak gampang. Mudah di mulut, di belakang mengkhianati kita. Bahkan aparat desa juga seperti itu. Laskar Samudera lahir sejak meninggalnya Salim Kancil, mulai dari penghijauan, kumpulkan bibit-bibit tumbuhan liar, sebelum adanya tambak masuk, penghijauan bersama teman-teman.

Tapi sekarang ada investor tambak yang tiba-tiba masuk, tak tahu ijin dari mana. Kita awalnya dapat undangan tanpa stempel desa. Tak tau siapa yang mengundang. Kami datang dan dengar. Sosialisasi akan bikin tambak: Camat, Kades, dan Luis udang Indonesia.

Mau membangun tambak sawah dari pesisir Selatan, bilanganya hanya menyewa. Yang setuju baru 2 orang dengan iming-iming listrik, karena di pesisir selatan itu 6-7 juta per bulan. Mereka mencari kelemahan warga untuk mengambil tanah mereka.

Dengan iming-iming kampung kota. Karena jalan pesisir Selatan itu masih pasar. Waktu hujan susah untuk listrik, kadang di tengah malam kabel putus ditimpa pohon. Saya pun ditanya, saya bilang tidak akan pernah menyetujui. Nggak papa kita akan diskusi lagi minggu depan. Setelah mau pulang dari balai desa, diperlihatkan oleh aparat, undangan mau diambil kembali.

Saya nggak mau kasih undangan itu. Saya bilang saya buang, saya bakar. Di minggu kedua aparat beri undangan sama seperti yang pertama. Dan menyampaikan ke ibu, jangan anak ibu yang datang tapi ibu saja.

Sepulang kerja, ibu bilang tidak boleh anak yang datang tapi ibu. Saya kepikiran bahwa ibu saya yang buta huruf akan diperdaya. Sosialisasi itu sama, mau bangun tambak dengan ditimbun. Jangankan ditimbun, air susah naik, dan akan merusak lingkungan dan akan kembali ke rawa.

200 meter dari permukaan air laut tambaknya itu. Saya menolak. Jangan kalah nhamya karena yang tidak melawan banyak. Meski sendiri saya akan tetap melawan. Sepulang dari sana, ada warga yang seperti makelar, datang ke rumah mau kasih 200



juta untuk 2 petak tanah, untuk tambak. Saya tidak akan menjual. Dia emosi, mau naikin tarif berapapun saya mau minta.

Bapak tidak tau bagaimana perjuangan ayah saya. Hati nurani kalian dimana! Aparat desa juga gimana dengan komitmen. Saya bilang ke ibu saya, ketika saya sedang pergi kerja.

Sewaktu ibu saya di rumah sendiri, ada yang datang mau beli tanah. Setelah itu kita pulang dan tidak mengungkit itu lama.

Sebulan kemudian sawah kita dipatok. Tidak tau di patok siapa. Kami bertanya ke Kepala Desa. Mempertanyakan undangan. Disitu mreka juga berdebat, karena tidak ada stempel. Bisa saja tambak akan jadi tambang. Mereka berdebat sampai 3 jam hanya karena undangan. Mereka saling menyalahkan. Aku minta mereka menjelaskan secara detail. Kita masih menunggu sampai sekarang tentang undangan itu. Belum ada respon.

Kita tetap melakukan penghijauan di lahan konservasi. Karena lahan sudah diserahkan sebagai lahan konservasi hingga di pesisir Selatan. Tapi tidak mudah, cari bibit, udah hancur dicabuti orang. Kita ngak akan nyerah.

Disitu kita juga banyak melakukan kegiatan, itu bibit-bibit yang tidak beli. Sebelum 100 hari almarhum, mbak Fifah pesan jangan sampai jual tanah ke siapapun. Kita harus kelola sendiri.

Moderator:

Pengalaman-pengalaman ini sangat bervariasi, dari berbagai wilayah dan kondisi berbeda, ada yang dari pesisir, pegunungan. Setelah ini bagaimana pengorganisasian masyarakat dari Surabaya?

*AFIFAH-NAMBANGAN:*

Peran ibu-ibu bantu bapak-bapak lawan tambang pasir. Awalnya tidak tahu dampak penambangan. Mulai kerasa ketika jaring petorosan, dan patoknya (pohon kelapa) roboh di tengah laut. Ketika roboh, di berdirikan lagi. Pas diselami, didalam sudah tidak ada pasirnya sama sekali, tinggal lumpur.

Bahan pengikat pohon kelapa sudah tidak ada lagi, petorosan tumbang. 90% pencari ikan menggunakan petorosan. Setelah tidak ada udang, ikan kecil, banyak yang beralih dengan mencari ikan bulu ayam dan udang yang besar.

Lama kelamaan, mereka para warga kami pas 2005 mulai menolak dengan melawan, tidak hanya investor saja, tapi ajak aparat setempat mencari dukungan dan jaringan untuk pembelaan HAM.

Sampai kami sempat mencuri AMDAL untuk pegangan keberhasilan kami. Tidak semua setuju melawan. Ada yang dikasih 400 rb. Agar laut kami bisa dikeruk pasirnya. 1 orang 400 rb.

Kami dengan yang sudah terima uang itu, bilang kepada kami, iso nggak awakmu itu berantas orang yang keruk itu. Sulit pengerukan itu dihentikan karena mereka ada uang. Karena adanya omongan itu, kami semangat untuk mengusir orang-orang itu.

Tahun 2013 warga kami tahu dan tidak takut dengan ancaman tambang pasir, bapak-bapak bersatu dengan ibu-ibu demo. Naik perahu ke laut dan istigosah, mengusir kapal-kapal besar penambang pasir laut kami. Ibu-ibu di pinggir laut ikut istigosah, agar orang-orang itu mau pergi dari tempat kami.

“tarmihin” “tarmihin” lempar batu ke laut agar mereka pergi, bapak-bapak aman. Polisi juga turut, bawa anjing sekalian. Ada yang ambil foto, ada bapak-bapak yang mencolot ke laut dan ditangkap. Suatu hari ibu-ibu ikut demo di depan DPRD, supaya bapak-bapak yg ditangkap tadi keluar. Tapi disemprot gas air mata. Padahal kami salawatan tidak rusuh. Sampai malam kita disemprotin. Kita tidak pulang dan gigih. Masuk lagi, diijinkan dan bapak itu pulang bersama kami. Pelajarannya sejak ada persoalan kami antusias untuk saling membantu.

Moderator:

Dari 3 narsum, pasti ada wilayah yang pro dan kontra. Setiap dengar kisah perlawanan, hati ikut tergerak.

*SITI-SIDOARJO:*

Awalnya, saya punya sawah. Di imingi pabrik. Lapindo dulu awalnya mengimangi sumur pengeboran, lalu saya punya sawah kumpul-kumpul di balai desa. Ditawar segini, menawar 500.

Lalu di Desa Mindi itu 120,.... campuran ya. .... (soal harga dan tawar menawar harga jual sawah). Mengikuti suara banyak. Awalnya ditawarkan, dicicil, diandalkan pak Bupati. Jika 500 jangan mau. Dulu tentram sejahtera, dapet penghargaan citra dari Surabaya. (cerita menyebutkan beberapa nama yang berdiskusi) bagaimana caranya membangkitkan ibu-ibu yang senasib, untuk kumpul-kumpul, ada konflik keluarga, ada yang kerja di pabrik rokok, industri, kumpul, berbagi. Lalu dicicil.

2011 sudah lunas. Kumpul-kumpul dengan ibu-ibu cerita cari solusi, kumpulkan orang jadi komunitas sampai sekarang ini. Komunitas Arohmah.

*RATNA; TUMPANG PITU*

Saya mau cerita perlawanan kami sudah lama. 2015 warga aksi tolak tambang. Aksi itulah yang sampai sekarang ini, antar warga sama pihak BSI mau minta kejelasan. Warga yang tidak pernah dianggap, membakar properti perusahaan, masuk pertambangan dan merusak fasilitas, termasuk bego dan ruang yang ada disitu.

Kejadian spontan, tidak tau siapa yg provokasi. Sampai kita tembak-tembakkan sama aparat. Ada 3 orang tertembak. Di aksi itulah, Fitri teman saya dijadikan korban, dituduh sebagai provokator. Ditahan 10 bulan. Dari kejadian itulah, warga yang awalnya ribuan menolak, ketakutan dengan sendirinya. Bapak-bapak yang takut di

intimidasi dan mau dicatat, jadi tersangka. Bapak-bapak dan ibu-ibu takut. Dari situ kami diem. Tidak tau mau mengadu ke siapa. Ada teman yang minta perlindungan ke teman-teman jaringan nasional. Tapi warga tambah takut dengan kejadian itu.

Aksi lagi 2016. PT masukin listrik untuk tambang. Warga menolak, tanah dimasuki aliran listrik tegangan tinggi. Cagak PLN terlalu besar, warga menolak, 10 kompi aparat datang. Warga diusir agar mereka bisa tanam kabel. Oleh tambang, kabel ditaruh di jalan. Dilewatkan di jalan raya depan rumah saya. Spontan aksi, ibu-ibunya yang menolak penanaman kabel. Karena jalan raya tempat anak-anak bermain. Siapa yang akan bertanggungjawab kalau ada apa-apa.

Ibu-ibu bertahan 5 hari agar lubang itu tidak digali dan ditanami kabel bertegangan tinggi. Polisi 200 orang, tidak berani pegang perempuan. Esok hari Polwan datang 3 kompi. 1 orang diambil oleh 6 aparat. Sampai ada yang baju dan celana copot. Karena Polwan masuk ke dalam lubang. Ada yang pingsan, ada yang kebuka semua bajunya. Padahal kita hanya tanya satu, siapa yang mau bertanggung jawab.

Anak saya yang masih 2 tahun saya ajak kesitu. Perempuan lah yang bisa meredam apapun dan bisa berpikir lebih luas lagi ke depannya. Sekarang ini kita akan membentuk komunitas.

Karena laki-laki mudah menyerah dan gampang emosi, kita bangun komunitas perempuan kelompok tani olah buah naga. Perlawanan aksi Selasa Kliwon, di depan kantor Bupati dan DPR. Kita ingin tetap batalkan ijin tambang emas. Kita tetep melawan untuk anak cucu kita. Sejahtera dari pertanian. Hidup itu tidak cari emas, tapi air. Kita bisa hidup tanpa emas, tak bisa tanpa air.

Moderator:

Selanjutnya dari YLBHI, karena tmbang itu rakus segalanya. Dan paparan strategi perlindungan HAM bagi pejuang.

*ERA-YLBHI:*

setiap perempuan punya banyak peran, bisa mahasiswa, istri, atau kerabat kepala desa yang pro tambang. Di tengah posisi itu kita masih harus memikirkan kondisi alam. Perempuan yang banyak kerjaan dan posisi, bayang bagaimana mengelola banyak hal dan kondisi alam.

## ***SESI DISKUSI TEMATIK V: PEREMPUAN, TATA KELOLA PESISIR, DAN ANCAMAN INDUSTRI PARIWISATA***

*HENDRO SANGKOYO:*

Pertalian antara kehadiran perempuan (bukan hanya sebagai penanda), dia mewakili sesuatu yang jauh lebih besar. Yang akan kita bicarakan sore ini adalah perempuan, dan tidak hanya manusia lagi, alam. Jangan main-main dengan pesisir. Bukan hanya perempuan yang dirusak, sama dengan kita semua sedang ada kehidupan yang sedang dirusak.

Ada biang keroknya. Ada yang memobilisasi orang-orang melancong. Yang tadinya nggak hobi melancong, jadi hobi melancong. Apa yang disebut sebagai sebuah industri pelancongan terorganisir. Tidak hanya perlawanan yang diorganisasi. Industrialisasi, pelancongan dan alam. Di seluruh kepulauan Indonesia, sedang dihajar industri pelancongan terorganisir pada diri perempuan. Perwakilan dari Kiara, Nambangan, BTR, Pulau Pari.

Di tahun 1995 Pulau pari menyimpan cerita penting soal hancurnya terumbu karang. Pulau Pari jadi berita, bukan karena ia dilukai oleh kapal tengker yang membuang minyak jelang pagi, banyak korban terutama petani rumput laut. Sekarang direbut sepenuhnya oleh raksasa.

Antara pelancongan terorganisasi dan perlawanan yang terorganisasi.

Silahkan sebutkan nama, mengapa disini, dan pengalaman batin menjadi garda depan perjuangan.

#### *AS-PULAU PARI:*

Saya ibu dari 3 orang anak. Dulu kami nelayan dan petani rumput laut. Setiap hari ada orang meninggal karena jentik malaria di tahun 2000. Rumput laut banyak yang mati. 2005 kita membangun pariwisata berbasis swadaya masyarakat.

Ketika wisata maju dan masyarakat mulai menghasilkan, pemerintah malah melakukan kriminalisasi dan intimidasi. Perusahaan datang dan klaim 90% tanah milik perusahaan. Dan mereka terbitkan sertifikat.

Dulu pernah ada girik yang disebarkan. Perusahaan menyalahgunakan, perebutan lahanlah yang terjadi. Ketika perusahaan terbitkan sertifikat tahun 2015, ada 6 orang dikriminalisasi. Warga masih perjuangan tanah kelahiran. Ketika warga tidak dapat perlindungan dari aparat seperti Lurah, Camat, Bupati yang pro perusahaan, kita langsung mengadu ke Gubernur.

Tanggapannya masih begitu, ketika kita maju dengan pariwisata kita, tetapi Lurah semakin memojokkan warga. Sedangkan ibu-ibu disana sudah bisa mencari mata pencahariannya sendiri. Kita bisa catering, tour guide. Banyak keuntungan jika wisata maju disana, dan ketika laki-laki dikriminalisasi, perempuan berjuang menghidupi warganya.

Kenapa terjadi kriminalisasi di warga. Kita tidak butuh investor, pengembang, kita tidak bisa hidup di darat, kita tidak terpisah dari laut, sehari-harinya di laut. Semenjak teman kita banyak dikriminalisasi, gerakan kami disana lawan korporasi dan pengusaha rakus yang ingin memiliki pulau kita. Setiap perusahaan membangun di pulau Pari, terjadi bentrokan besar antara warga dan aparat. Tahun 2017 November.

Perempuanlah yang jadi pagar betis. Pertama kali itulah saya diinjak dan teman-teman, dan tidak pernah ada perlindungan dari pemerintah, tapi malamnya kita udah kompak, jika kita diinjak kita akan bakar kapal boat mereka.

Dengan kedatangan polisi, awalnya takut. Jika ada boat yang masuk, kita curiga akan ada kriminalisasi. Rasa aman sudah tidak ada, ketakutan setiap hari, selalu ada ketakutan melaut. Ketika kami diinjak ada anak-anak yang melihat hal itu. sehingga anak-anak menganggap polisi jahat. Besoknya kita pergi ke Jakarta mengadukan ke Komnasham, KPAI, karena jarak kita dekat ke Jakarta seberang laut 2 jam.

Disitu pemerintah tidak hadir lagi di tengah warga. Kenapa suara kita hanya diperlukan pada saat pemilu, kita berencana, jika ada kotak kosong kita akan memilih kotak kosong itu, kita tidak percaya pada pemerintah.

Kita tidak pernah jual tanah, tidak ada pengukuran, tidak pernah ada BPN datang, tidak ada pengukuran, kenapa terbit sertifikat. Tidak ada jawaban memuaskan. Pinternya perusahaan merekrut warga, sekuriti direkrut. Jadi kita harus bentrok sama keluarga kita. Sayangnya keluarga kita lebih memilih uang. Tapi saya merekrut ibu-ibu setiap mau aksi dan rapat, seminggu sekali, saya memanggil ibu-ibu dari rumah ke rumah untuk rapat.

Setiap lembaga yang mau datang ke pulau Pari, kita dibantu sama lembaga-lembaga, seperti Kiara, Walhi, LBH Jakarta, untuk selamatkan pulau Pari. Saya terima kasih sama lembaga tsb. Itu yang memberi banyak pelajaran untuk warga disana. Ibu-ibu disana sekarang lebih maju lagi, kalo bukan kita siapa lagi. Kita sudah tidak percaya lagi sama mediasi perusahaan. Ngapain mediasi jika ada kriminalisasi.

#### *HILMA-NAMBANGAN:*

Di setiap daerah, semua masalah sama. Kita menghadapinya, sebelum ada pengerukan pasir sudah ada kelompok ibu mandiri dan kita sudah ada penguatan di kelompok itu. Setiap dua minggu sekali ada kumpulan.

Setiap minggunya pengumpulan sampah-sampah bekas. Tujuannya untuk karena disana tidak ada pembuangan sampah. Untuk membersihkan sampah di daerah.

Di tahun 2005 ada pengerukan pasir, bapak-bapak dulu yang terjun ke laut. Alhamdulillah berhasil. 2013 ada lagi. Ibu-ibu istigosah di pantai, bapak-bapak ke laut. Saat itu di foto sama orang kapal pengeruk pasir (tambang). Dan kami perang langsung sama Polisi air. Waktu itu kita sempat disemprot dengan seperti yg diceritakan tadi.

Tapi kita tidak langsung pergi. Tapi tidak itu saja, kami sempat hearing , debat dengan DPR dan alhamdulillah berhasil. Dapat dihentikan karena Amdalnya sangat menyimpang dengan yang diukur dari batas rumah.

Ada pemulihan di daerah kami dan ada sampah dan dibuang ke TPS. Dan yang kami alami waktu itu, nggak berperang dengan orang yang tadi itu, tapi dengan rentenir. Banyak dimana-mana dan mereka ke rumah2 menawarkan KTP, apa yang bisa dicairkan. Dan kita ingin mengetes orang yang terikat dengan rentenir karena banyak yang lari ke Malaysia karena terbelit hutang. Dan yang mengelola ibu-ibu bukan

bapak-bapaknya. Karena bapak-bapak tidak tau mengelola. Peran ibu penting 24 jam nonstop.

Kata orang kalau mau kaya harus kerja keras. Tetangga saya namanya ..... pagi kerja sore kerja malam, siang, sampai matanya belekan. Uangnya ya itu, buat rentenir. Nggak ada putusnya. Saya ddnger-denger, kalo hutang itu 90% bunganya itu.

Dan kita teringat dengan cuaca ekstrim yangg tidak menentu. Ikan-ikannya sepi. Ibu-ibu dan bapak-bapak kerjasama bikin koprasi. Berjalan smpai 2 tahun berhasil dan anggotanya udah ada 120. Kita punya 4 unit. USP simpan pinjam, ada tabungannya juga. Tabungan hari raya. Karna ibu-ibu butuh uang banyak. Hanya bisa diambil hari raya. Ada yang untuk pendidikan, bisa diambil untuk paceklik. Rata-rata saat paceklik, banyak yg dijual seadanya, seperti piring, jarik. Kita ingin menyejahterakan rakyat dengan cara sperti itu. Dan ada lagi toserba menjual peralatan tangkap ikan itu, tujuannya tidak jauh ke Pabean, agar kita tidak harus ke Pabean, karena jarang yang punya SIM.

Dan kita ada pariwisata, yang ada edukasinya. Cara membuat jaring, cara menyelam, yang urusan dengan laut. Ada lagi, satuny hasil olahan ikan bulu ayam, karena teri ini biasa dijual mentahan. Kita ingin menjual hasil olahan tadi tapi kami sementara ini, jual di toko, tapi juga membuat di facebook, online.

*HENDRO SANGKOYO:*

Kita sekarang masuk cerita yang di garis depan perlawanan, dari BALI.  
(nontn video BTR)

*TOPAN-WALHI BALI:*

Di ForBali saya nyiapin demo, dari properti aksi, tanggal, dll. Kali ini mau sharing tentang bagaimana di For Bali mengajak temen-temen dari desa adat, komunitas yang awalnya sudah ada konflik-konflik yang sudah lama, yang sudah mengkristal, waktu sudah ada isu reklamasi bareng bergerak.

Kenapa mereka menginginkan reklamasi, karena strategis, ada sunrise dan sunset. Di teluk Benoa sudah dapat 2 itu, akses transportasi dekat dengan pelabuhan dan bandara. Perusahaan tidak perlu lagi bikin transportasi, di daerah Badung, promosi wisata sudah terbangun, branding terbangun, dan tidak perlu keluar uang untuk promosi.

Teluk Benoa sudah terbranding sebagai kawasan wisata.

Kronologi singkat: awalnya For Bali tidak tau SK reklamasi teluk Benoa muncul, karena Gubernur Bali selalu mengelak, tidak tau jika ditanyai wartawan.

Tanggal 27 juli 2017 ketika rapat di DPRD, sewaktu wartawan menunjukkannya. SK tidak disetujui oleh masyarakat. 3 Agustus konsultasi publik, masuk susah keluar susah. Dijaga orang berbadan besar-besar sebesar kulkas 2 pintu. Tapi akhirnya selamat keluar.

SK 1 dicabut 16 agustus 2013, namun Mangku Pastika kembali menerbitkan tentang studi kelayakan teluk Benoa, berbarengan dengan pencabutan SK yang pertama. Bedanya yang pertama langsung memberi ijin, yang kedua diberikan ijin penelitian, perusahaan sama, luasan sama.

Lalu gubernur Bali sempat bilang, jangan protes-protes masyarakat Bali, kita tunggu dulu kajian dari UNUD. Oktober 2013, Rektor UNUD mengatakan reklamasi tidak layak. Janji gubernur akan mencabut SK ijin penelitian teluk Benoa ingkar. Malahan memberikan PT melakukan kajian ulang diluar UNIV yang ada di Bali. ITS, UGM, ITB, Unhas, dan reklamasi layak dilakukan dari hasil 5 univ tsb.

Lalu penguasa dan pengusaha ini paham bahwa yang menghalangi reklamasi ini adalah regulasi. Presiden SBY ubah status dari perlindungan jadi budidaya yang bisa direklamasi sebesar 100 hektar. Perpres 52 tahun .... Ttg perubahan ,... dan banyak keanehan muncul pada bulan Januari 2014.

Kita demo di istana, datang ke Jakarta, selang 4 hari muncul berita di Kompas, bahwa reklamasi di teluk Benoa dilakukan seluas 700 hektar dan 50%nya dikembangkan sebagai kawasan hijau. Ini alasan mengapa perpres 45 dirubah (slide) pasal 1.1.a ..... artinya apa yang dikatakan oleh manajemen Artha Graha sama dengan peraturan yang diterbitkan oleh SBY.

Per 26 Desember 2018 Susi telah terbitkan ijin ke PT. Artinya perjuangan untuk lawan reklamasi di teluk Benoa masih berlanjut. Tadinya kami sempat rehat. Dampak teluk Benoa jika direklamasi, rentan tsunami, di tengah ini adalah pulau yang akan direklamasi. Jika rencana jalan, maka bangunan-bangunan yang digagas oleh PT adalah bangunan pembunuh, yang terbawa arus ombak.

Namun PT bilang bangunan untuk mitigasi bencana, namun faktanya, riset LIPI, teluk benoa kawasan rawan likuifaksi. Bagaimana likuifaksi melanda Palu, ketika reklamasi dan gempa maks 1 mnit... SR, tanah akan amblas.

Kita juga akan kehilangan nilai yang tak bisa diukur dengan uang. Karena arena perlintasan burung, Australia-Siberia. Ketika teluk Benoa dibangun akan merusak habitat burung yang mncari makan di daerah tersebut.

Sehingga bali akan sangat rugi dan dituntut dunia international. Dan merusak kawasan suci, di desa adat untuk pembakaran. Merupakan situs suci.

Bagaimana For Bali belajar bersama masyarakat sehingga gerakan menjadi besar? Awalnya aksi dilakukan oleh 25 orang. Kita terus aksi setiap bulan, lalu kita juga melakukan pengorganisasian ke komunitas yang dalam menjadi pelajaran dari teman For Bali sendiri adalah dimulai dari anak-anak muda, bukan dari desa adat yang sekarang jumlahnya 39.

Awalnya melalui komunitas, RT RT untuk menyatakan sikap tolak reklamasi. Prinsip gerakan; kentut pun harus bunyi tolak reklamasi. Seluruh kegiatan yang kami lakukan

harus untuk tolak reklamasi. Kita juga diskusi ke anak-anak muda, soal dampak, bersih pantai, aksi-aksi tolak reklamasi dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Di foto ini perempuan ikut dalam persiapan hingga aksi.

Disini kegiatan seni ogoh-ogoh kita juga gunakan untuk tolak reklamasi. Sewaktu ada lomba dan pemuda menang, dia bawa pesan tolak reklamasi. Ini hasil pengorganisasian kita pada tahun 2016 di bundaran Ngurah Ray.

Puluhan ribu orang ikut di aksi, diorganisir oleh pemuda desa adat yang telah menyatakan sikapnya. Awalnya di desa adat tsb ada heritage-heritage. Awalnya mereka memiliki konflik yang mengkristal. Adanya isu reklamasi, konflik-konflik kita arahkan untuk lawan reklamasi.

Misal ada komunitas desa adat deklarasi tolak reklamasi, desa adat yang lain ikut dukung. Di aksi, selalu menampilkan aksi budaya. spirit ogoh-ogoh. Semaksimal mungkin dibikin riang gembira. Agar terasa seperti refreshing. Bukan seperti demo. Kita juga maksimalkan medsos. Karena inilah kekuatan gerakan tolak reklamasi.

Setiap ada kegiatan advokasi kita selalu update di sosmed yang kita miliki disitu. Ada ig, web, fb, twitter. Medsos menurut saya berperan penting dalam memperbesar isu reklamasi di Bali. Selain itu di basis memiliki cara unik untuk tetap membuat isu tolak reklamasi ini penting diketahui dan penting untuk dilawan. (Contoh di slide) banyak acara keseharian yang membawa pesan tolak reklamasi teluk benoa. Kegiatan konser musik, aksi dilaut, dll. Laki atau perempuan tidak ada peran khusus, sejauh siapa yang bisa. Ibu-ibu di kabupaten Badung touring sambil kampanye. Uniknyanya yang touring adalah ibu-ibu dan di rumah adalah bapak-bapaknyanya.

#### *SUSAN: KIARA*

Mau menambahkan soal likuifaksi di Palu. Kampung muara ada 44 kk di pesisir yang dulunya adalah laut, yang telah direklamasi. Ketika ada gempa tanahnya amblas, bukan hanya orangnya rumahnya ikut amblas ke dasar laut. Dan banyak yang belum ditemukan. Saya belajar banyak bahwa alam juga diotak atik, karena kita ini numpang.

Belajar banyak dari titik-titik di pesisir yang harus menghadapi bencana yang luar biasa. Soal industrialisasi wisata, dalam beberapa tahun ini ada pergeseran yang menampung kawan-kawan yang butuh piknik.

Industri semakin masif. Banyaknya aplikasi itu disiapkan untuk menampung kebutuhan wisata. Gambaran umum 2018 budidaya ikan kita mampu mencukupi kebutuhan bahkan sampai ekspor. Tapi kita belajar dari mbak Ike, tambak udang adalah komoditi yang bikin greget, karena dampak ekologisnya luar biasa.

Di tengah produksi luar biasa, di 2018 ada peningkatan luar biasa dalam hal konflik yang dihadapi masyarakat pesisir (masy bahari) karena yang ngurus laut tidak hanya nelayan, ibu-ibu, penambak garam, dll.



Di 2018 ada 24 konflik, ada 17 yang dikriminalisasi: pulau Pari, Tumpang Pitu, NTT. Di 2019 konflik ini akan semakin meningkat. Modus pake pasal karet. Sperti apa aja itu?..... Dengan proses hukum yang tidak wajar.

(slide) perempuan-perempuan hebat yang ada di NTT. Ada peningkatan cukup signifikan titik-titik reklamasi. Teluk Benoa adalah perlawanan paling panjang. Data (di slide) puluhan ribu nelayan. Scope lebih besarnya lagi ada jutaan orang yang akan terusir dari ruang hidupnya.

Kiara mencatat tidak ada negara maju dengan pertambangan. Tambang tidak masuk akal dilakukan dimanapun termasuk pesisir. Tidak hanya darat. Bahkan ada yang nambang pasir, kiara catat ada 37 yang harus lawan tambang.

Dalam 2 tahun terakhir ini semakin berat karena industrialisasi wisata ini jadi barang baru dan didukung oleh negara. KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) ini mengerikan, karena ada 4 titik yang paling kita garisbawahi di Mandalika (bajo) dan Flores.

Ada 4 KK yg diusir dari rumahnya hanya dikasih 3 juta, di pindah di kawasan lereng. Nelayan padahal tidak bisa ditempatkan jauh dari laut. Jika ombak tinggi, masyarakat bahari akan buka jendela dan senter, oh perahunya masih aman.

Di Labuhan Bajo dan Flores, kita sedang riset. Untuk masuk di taman nasional Komodo akan membayar 6 juta. Siapa yang bisa masuk? Masyarakat sendiri tidak bisa mengakses wilayahnya. Di RPJMN untuk narik 20 juta wisata internasional dan .... Targetnya sebanyak 280 trilyun. Ini yang diklaim oleh pemerintah.

Pertama adalah menyatakan bahwa KSPN ini tidak ekstraktif dan berwawasan lingkungan. Ini tidak benar. Karena yang akan didorong infrastruktur dan fasilitas. Kedua; pemerintah menyatakan proyek ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. Siapa saja yg didefinisikan? Jangan-jangan nelayan akan jadi buruh di sektor wisata tsb, seperti nelayan jadi sekuriti. Apakah kita akan jadi kuli di bangsa kita sendiri?

132 Trilyun akan dipakai untuk menyokong industri wisata (melalui infrastruktur dan fasilitas) dan dananya itu akan utang untuk bangun infrastruktur KSPN. Di Labuan Bajo terancam ruang hidupnya, tidak bisa akses laut dan harus beralih profesi.

Mendengar cerita kawan-kawan, sebenarnya semua carut marut tambang, wisata, reklamasi, dilegalisasi melalui zonasi .... Dan pulau-pulau kecil, akan ada perda yang bagi-bagi kawasan wisata, tambang, reklamasi. Ini mnyedihkan. Stelah JR gugatan menang UU direvisi UU No1 tahun 2014, mandatnya harus bikin .... Pasal-pasal nya lebih ngeri lagi. Pengelolaan pulau bisa dikelola investor asing. Salah satu yang terjadi yang mndorong praktik penguasaan ruang.

Banyak sebenarnya kisah sukses wisata yang ekologis. Serdang Bedagai (kelompok ...) persaudaraan perempuan Indonesia, dengan menanam mangrove. Organisasi laki-laki dan perempuan untuk menanam, perjuangan bersama. Salah satu fasilitas

yang diberi oleh negara. Semua dilakukan secara kolektif. Sering ada kabar baik, seorang bisa dapat SHU 10 juta. Dalam konteks perempuan, ada kekhasan. Menumbuhkan juara baru perlu proses panjang. Dari yang deg-degan pegang mic, sampe jadi bangga. Proses panjang, satu hal yang penting gerakan harus dipimpin oleh nelayan itu sendiri. Karenamereka yang paling tau lautnya. Ini rekomendasi apa saja.

Negara ini harus menjalankan MK no ... Konstitusi masyarakat pesisir. Hak utk ... (ini urat nadi perjuangan kita bersama). Ibu bumi, laut juga ibu, merusak laut sama dengan merusak ibu. Kawan-kawan di pulau Pari juga mendorong reforma agraria di pesisir. Meski secara tegas KIARA belum mau bicara itu. Karena masyarakat pesisir tidak bisa dibatasi identitasnya dari sertifikat. Ketika reforma agrarian dibahas kita menahan diri mau berpendapat.

*HENDRO SANGKOYO:*

Semua nggak ada yang nggak penting. Semua yang dituturkan barang kali baru puncak gunung es. Karena banyak sekali yang bisa digali. Kalo bisa jangan bawa lembaga, karena ini masalah bersama. Tanpa bermaksud menyimpulkan.

Ketika ada perampasan ruang hidup di wilayah pesisir, sebenarnya tidak ada salah tempat di perspektif ekstraktifisme. Yang kita tolak adalah kenapa semua harus diekstraksi menjadi milik korporasi. Bagaimana ruang, siapa yg diekstraksi? Didepak? Yang didepak malah orangnya. Orang diusir, khususnya warga pesisir, nggak bisa kemana-mana karena semua ada di dalam darah itu. Membayangkan perubahan iklim, bagaimana pulau-pulau Pasifik?

Ada satu pulau ... yang akan klelep. Rencana pertama mau ditaruh di Queensland, semua menentang sebagai pelanggaran HAM. Dia nggak mungkin dpindahkan. Kita sibuk bagi-bagi ruang dsbg. Kita masih terlalu khusuk dalam logika tata ruang. Artinya apa? Pertemuan kita perlu tindakan untuk menamai diri kita sendiri? Kita sedang melakukan apa? Kalau saya ngerasani sebentar, BTR mengingatkan kita 1909, puputan BALI yang mempersatukan desa adat. Artinya kita semua suka nggak suka, mau nggak mau terhubung dengan akar kita masing-masing. Gerakan harus dimulai dengan merebut kenyataan itu sendiri. Saya pernah tersinggung sekali, akan dibikin pulau lumpur.

Masyarakat pesisir memiliki ketangguhan sendiri, yang tidak dipahami oleh negara. Kita ini siapa dan ada dimana? Kesatuan sosial ekologis menyejarah.

Pertanyaan besar saya: dimana kita akan ketemuan selanjutnya?

**Hari III: 16 Februari 2019**  
**Metode notulensi: Verbatim**

***SESI DISKUSI TEMATIK VI: GERAKAN MAHASISWA DAN PERJUANGAN RAKYAT***

Nb: notulensi untuk sesi diskusi ini akan menyusul.

***SESI DISKUSI TEMATIK VII: AIR DAN KOMUNITAS-POTRET KRISIS DAN KOMODIFIKASI AIR***

**WARGA LAKARDOWO:**

Dulu kami berani minum tanpa dimasak. Tapi karena ada perusahaan yang nimbun B3 sejak 2010, dampaknya dari 2016 anak-anak yang mandi jadi gatal-gatal. Tapi bila dimandikan dengan air yang kami datangkan dari Pacet itu tidak gatal lagi. Sejak ada limbah B3, kami terpaksa mendatangkan air dari luar (Pacet).

Dan apa yang sekarang sedang kami lakukan itu ibu-ibu mengukur TBS, ion yang larut dalam air. Tiap bulan TBSnya air itu naik. Apalagi di bulan kemarau. Kalau musim hujan gini, TDSnya turun.

Harapan kami, jika ada yang membantu kami agar air seperti semula dan tidak terkena limbah dan bahan kimia, bagaimana caranya? Karena setiap harinya kami pakai air dari Pacet. Untuk 4 hari itu satu tangki. Sehari 1-2 galon untuk satu rumah.

**Moderator:**

Krisis air sungai dan industri yang di hilir, dari hulu juga ada problem. Bagaimana krisis yang terjadi?

**ARIS-BATU:**

Jika di Mojokerto bagian bawah ada ancaman tercemar air, kalau masyarakat kota Batu ancamannya hari ini adalah bagaimana air semakin berkurang di kota Batu yang dinyatakan sebagai kota industri pariwisata, yang disana digenjot besar-besaran pembangunan wisata untuk pendapatan daerah sehingga aspek lingkungan diabaikan.

Banyak pembangunan hotel yang mengorbankan nilai-nilai lingkungan, di sekitar mata air salah satunya di Bumi Aji. Disana seharusnya tidak boleh dibangun hotel, karena alasan konservasi.

Tapi dilanggar pemerintah. Kami sempat melakukan penolakan, sudah 6 tahun. Saudara kami juga sudah dikriminalisasi. Sampai tahun 2016 dinyatakan tidak bersalah dan urung dikriminalisasi.

Kami sekarang konsen untuk bangun komunitas di Batu Malang agar lebih peduli. Dari RTRW tahun 2019 sudah akan dilaksanakan, karena kajian lingkungan strategis sudah sampai ke DPR dan kami sudah dapat salinannya. Semoga kita saling

menginspirasi. Ketika ada yang di kriminalisasi, perempuan menjadi benteng terdepan. Mereka sempat mau nginep di Polres Batu dan kami sangat apresiasi sekali.

Moderator:

Batu itu kecamatan yang ada 81 hotel, jumlah mata air ada 110. Di tahun 2010, mata air jadi 57. Separuh dari sumber mata air menghilang. Akibatnya kita tergantung pada air PDAM. Awalnya swadaya menjadi di negaraisasi. Apakah ini krisis air? Atau nasib buruk? Apa yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air kita?

*IJEK-KRUHA:*

Soal krisis, soal definisi itu perlu dibicarakan. Karena semua orang hari ini memakai kata krisis tergantung kepentingan. Term ini dipakai sejak tahun 70an. Konferensi di Rio yang melahirkan .... Prinsip.

Ada dua cara pandang, Bank Dunia mendefinisikan krisis sebagai kelangkaan karena keborosan. Solusinya adalah dengan hemat air melalui pasang harga. Dan itu masih bisa dipakai dalam konsep REDD. Cara pandang itu yang sedang dilawan.

Cara pandang kedua adalah ketidakadilan air. Ada cemar air pasti karena ada pasar air. Itu yang sesungguhnya terjadi. Yang terjadi adalah ketidakadilan air. Persoalan ini berhutang banyak pada gerakan perempuan, yang mendorong PBB deklarasi bahwa air adalah hak dasar manusia. Tapi itu teksnya.

Tapi kita juga menghadapi teori dan fenomena yang ada gapnya. Pasal 33, air harus dikelola satu titik. Jika dikelola banyak pihak akan timbul monopoli.

Di Malaysia, krisis air sedang terjadi dan ada kelompok rentan terjadi. Dan harus dilindungi. Di Indonesia krisis air yang terjadi cenderung pakai orientasi yang pertama (cara pikir bank dunia). Krisis dieksploitasi untuk menghasilkan proyek besar dan raksasa.

Di Citarum, Bank Pembangunan .... Kasih banyak pinjaman, air untuk alokasi pertanian. Petani yang dulu dipaksa nanam beras, dikonsentrasikan disitu. Penggunaan pupuk dipaksakan, butuh banyak air. Sekarang airnya dikurangi 40%, sementara air di Jakarta dikuasai ..... Penggunaan bahasa banyak menipu kita.

Ada tiga kata kunci dari diskusi ini: 1. Ekstraktivisme (neo ekstraktivisme) ideologi keruk, tidak hanya secara fisik, tapi juga cara pandang. .... Kengawuran ini sudah luar biasa. Manusia bisa diinjak atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama nasionalisme. 2. Alam bisa dirusak, bikin waduk, tenggelamkan desa. 3. Soal solidaritas, disitulah kita bertumbuh. Negara tidak akan berfungsi tegak tanpa ada gerakan warga terorganisir dan bersolidaritas.

*HENDRO SANGKOYO:*

Terima kasih, ini bukan forum, tapi bertukar pengalaman batin. Apa yang hendak saya sampaikan itu pribadi. Karena saya dibenturkan langsung dengan cerita air

tanpa belajar. Yang pertama, tidak adanya air untuk tubuh, sebagai orang yang suka kelayapan. Nggak makan itu bisa bertahan sampai 7 hari, tapi jika nggak minum air kita akan cepat tamat.

Karena proses reproduksi tubuh kita, itu butuh air. Semua air yang bisa masuk ke tubuh kita dan besok bangun nggak pingsan itu berkurang cepat sekali.

Air tawar itu istilah yang sering kali tidak tepat. Proses-proses Faal itu butuh air. Di seluruh dunia hanya 3% air yang bisa kita minum. Apa yang sangat penting dilawan adalah bahwa pulau kita sekali dirusak, airnya nggak balik lagi.

Di Pulau Bawen, ada pulau kecil yang mau dibongkar jadi real estate. Sekali air hilang, dia akan digantikan dengan air laut. Dan kalau kita konsumsi air laut terus menerus, sudah jelas rusak ginjal.

Hilangnya air yang bisa dikonsumsi orang biasa seperti kita. Indonesia masalahnya cukup pelik. Di Delta Niger itu, sumber airnya besar untuk seluruh Afrika. Kalimantan juga dirusak secara sistematis oleh Indonesia. Dari 1970-1992. 1/3 luas daratan beserta airnya dinyatakan bangkrut. Ada airnya, ada pencemar dan semua berantakan. Tidak ada pulau yang tidak sedang dirusak airnya.

Dari Ibu Kurniati, mengingatkan bahwa tidak hanya air yang dirusak. Yang masuk ke tubuh kita adalah air yang seperti mengunci semua proses yang seharusnya terjadi.

Proses enzimatik. Apa itu? Misal kita kena racun karena minum autan tanpa sengaja, itu bisa diglontor. Yang terjadi di Lakar Dowo itu harus dibela oleh semua orang yang hadir ataupun tidak disini.

Lakar Dowo ini ujung tombak dari kerusakan lingkungan hidup kita. Yang dimasukkan ke situ adalah sisa pembakaran batu bara, kerak bagian paling bawah. Menyangkut apa saja yang tidak boleh masuk ke tubuh. Soal minuman botol, nanti ada cerita.

Apa yang ada di air: 1. arsenic, yang membunuh semua aliran dari enzim, 2. merkuri, 3. natrium (papan atas racun yang harus jauh dari tubuh), 4. uranium.

*Ilustrasi: Nino yang bangun rumah pake semen. .... kerak bagian bawah batu bara tsb mengandung 4 racun tersebut. Uranium itu untuk penelitian bom atom. Apa yang kita sebut sebagai bom atom itu, bahan bakunya dari PLTU.*

Dalam 6 bulan PT Semen berhasil bikin standar baru, bisa pakai bahan beracun (sisa batu bara tsb) .... Racun juga ada di Semen untuk bangun rumah kita. Air tawar juga hilang. Ada seorang perempuan bernama ,,,,,, berkesimpulan bahwa air adalah kunci kenapa kehidupan bisa jalan.

Kunci kehidupan ada di air. Proses itu hanya terjadi kalau ada air. Bahkan ada yang berkesimpulan kita harus segera ngungsi, karena air di bumi segera habis. Kita

sedang membutuhkan nama baru untuk kita sendiri. Jangan berhenti disini. Di jambore ini.

Saya sekarang mau melamar jadi warga berlawan di Lakar Dowo. Ke Mas Aris, saya juga demikian. Apa yang disampaikan Mas Aris tadi untuk mendorong....

RTRW adalah instrument utk mengekstraksi. RTRW adalah instrument agar kita patuh pada rezim tata ruang dan itu bejat. .... Citarum. ....milyar untuk tentara.

Sekali lagi kita tidak bisa menggantungkan apa-apa pada mesin perusak alam. Jika sistem operasi dari mesin besarnya itu tidak dirubah, kita akan jadi pembuang limbah berbahaya. Intinya saya ingin ini jadi percakapan awal, harus nyambung. Sebelum pulang, kita harus janji dulu satu sama lain. Di Lakar Dowo, masalahnya tidak hanya anak gatel-gatel.

### **TANYA JAWAB**

*WARGA MADURA:*

Mengenai solusi. Bagaimana masalah yang sudah kita sampaikan ini, tidak ada dukungan dari pemerintah. Apa gunanya DPR? Buat apa ada sistem pemerintah jika merugikan? Bubarkan saja pemerintah!

Seandainya pemerintahan itu mendukung gerakan kita dan menolak tambang. Tambang itu tidak akan ada. Bagaimana PDKT dengan pemerintah, agar mereka tidak sewenang-wenang?

Jika mengenai air, saya sepakat jika air adalah kunci utama dalam kehidupan.

Pertanyaan Kedua:

Apa yang kita lakukan jika suara kita ditolak dan diacuhkan atau bahkan dianiaya? Strategi apa yg akan dilakukan? Karena saya juga melawan pemerintah setempat, organisasi perempuan, malah mereka tidak lirik.

Dana malah jadi problem mereka sendiri. Mereka bikin program agar dapat proyek dan seolah kita tertindas.

*IJEK*

Dari kemarin sudah diceritakan, dari cerita ibu-bu bahwa air itu uratnya. Ini saling terkait semua hulu-hilir. Solidaritas harus lintas pulau. Persetan dengan pemerintah, yang penting kita paksakan.

Problemnya bukan diregulasi, tapi memang nggak mau. Orang dibunuh, dituduh PKI, dll. Itu ngajarin kita bahwa nggak ada kasus yang selesai 1 tahun.

Intinya daya tahan dan perempuan yang paling tahan. Karena nggak akan lari dan selalu di depan.

Jawabannya: pergerakan sebagai perlawanan terencana dan sistematis. Pemerintah itu harus dilawan, masa depan itu gerakan.

*ARIS:*

Sepakat dengan Ijek. Bagaimana penguatan antar kita yang tertimpa bencana seperti ini. Masalah kota Batu tidak hanya masalah daerah-daerah lain. Sehingga bagaimana forum ini saling menguatkan. Jika ada masalah akan ada solusi. Penguatan nilai-nilai kearifan lokal setempat yang masih menjadi tameng ampuh.

Masyarakat lokal punya nilai adat, disitu sudah memiliki kekuatan. Sama seperti ketika kita bikin selamatan Sumber. Istilahnya meta legal: alam ini tidak hanya manusia, tapi ada alam dan tumbuh-tumbuhan.

Siapa pun yang mengomandoi masalah gaib disini, Allah akan menghukumnya. Dukunnya kemudian meninggal dan nggak boleh dimakamkan disitu. Penguatan nilai kearifan lokal.

*LAKAR DOWO*

Tetap semangat. Awalnya pengorganisasian bapak-bapak, lalu green women. Tapi sekarang itu bapak-bapak melemah dan yang bangkit adalah ibu-ibu.

Kami bersama teman-teman menghadapi gugatan peradilan. Kami akan terus berjuang demi anak cucu kita.

*UMI-Semarang*

Dari pembahasan terkait privatisasi air dan akses masyarakat yang dihilangkan. Terkait peran negara, seharusnya pengelolaan air diserahkan pada negara selaku badan publik.

Tetapi kita melihat bahwa negara pada akhirnya berideologi privat. Sebetulnya tidak ada bedanya negara dan privat. Perbedaan publik dan privat itu kenyataannya berbenturan.

Pengelolaan air privat di daerah Batang, air dikelola privat yang murah. Masalahnya pengelolaan air, dimana air ada harganya, tidak bebas akses. Apakah dengan melabeli harga air termasuk menjadi langkah, yang membatasi perilaku privat yang ada di sektor air.

Perjuangan di ranah hukum kadang tidak sejalan dengan kenyataan. Sejauh mana WB mempengaruhi pembuatan UU.

*IJEK*

Tahun 2015 MK menetapkan hak atas air untuk rakyat. Artinya negara bisa diakui keberadaannya jika fungsinya berjalan. fungsi air sebagai Sumber Daya Bersama.

Dalam konteks UU Air, hukumnya sudah tegak bahwa air itu harus diatur dalam domain publik, tarif itu bahkan tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Artinya air

hanya boleh dipake untuk sanitasi, air minum, baru pihak lain boleh diberi alokasi pada pihak lain. Tapi situasinya terbalik. Yang sedang kita saksikan kemajuan perusahaan, kemunduran otoritas publik. Negara tidak hanya dipusat, negara bisa di kampung-kampung. Warga gergaji pipa aqua itu konstitusional! Pemerintah itu bukan pemilik negara.

*HENDRO SANGKOYO:*

Saya usul masing-masing kepala dan hati itu, untuk menanamkan bahwa dulu bisa gini, sekarang ada racun. Banyak pelajaran yang bisa kita peroleh.

Sehingga kita bisa berhubungan satu sama lain. Artinya penting sekali untuk menyambung ini. Yang paling tau bukan kita yang datang sekali2, warga yang paling tau. Saya berharap agar bisa belajar dari teman-teman yang berada di garis depan kerusakan ini.

*ARIS*

Perjuangan ini butuh nafas yang panjang. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamu'alaikum wr.wb

*LAKARDOWO*

Sekarang ini film-film kami sudah dinobarkan di mana-mana. Kalau ada yang tau Lakardowo mencari keadilan maka itulah film kami, maka kami mohon dengan dan doanya agar permasalahannya kami cepat selesai.



### **CATATAN DAN USULAN RENCANA TINDAK LANJUT (DARI PANITIA)**

1. Selama 2 semester di tahun 2018, WALHI Jatim menyelenggarakan sebuah kegiatan putaran belajar di 4 wilayah yang berkonflik dengan industri pertambangan (Banyuwangi, Lumajang, Sidoarjo, dan Surabaya), bersama kelompok perempuan-perempuan pejuang. Jambore Perempuan Tolak Tambang ini adalah puncak penutupan kelas belajar perempuan tersebut.
2. Dalam rangka mempertemukan pengalaman dan pengetahuan belajar tersebut, panitia Jambore Perempuan Tolak Tambang, mengundang kelompok-kelompok warga lainnya untuk memperkaya, memperdalam, dan membuka ruang konsolidasi antar pejuang ruang hidup.
3. Kami, selaku panitia, berharap putaran belajar dan pertemuan ini dapat menjadi pintu awal untuk menguatkan konsolidasi gerakan rakyat menjadi lebih kuat, terbuka, dan mandiri, yang selanjutnya dapat diperluas tanpa tersekat dengan batas-batas wilayah administratif yang dibubuhkan oleh negara ataupun provinsi geologi, ataupun eksistensi dan identitas organisasi masing-masing.

***Maka untuk melanjutkan putaran belajar dan beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam Jambore Perempuan Tolak Tambang, kami selaku panitia mengusulkan:***

1. Mendorong sebuah pertemuan konsolidasi dan pertukaran pengalaman-pengetahuan antar pejuang ruang hidup yang menjadi korban kriminalisasi dalam skala pulau (Jawa); warga perkotaan, pinggiran hutan, pedesaan, pesisir, Dsb, yang melawan industri pertambangan, energi, institusi perhutanan, properti-real estate, pariwisata, perkebunan, infrastruktur, Dst.
2. Adapun tujuan lain dari usulan tersebut, adalah sebagai ruang strategis belajar bersama antar individu dan komunitas untuk:
  - Membaca kembali sejarah dan bentuk kriminalisasi dari era pra kolonial (monarki) hingga era kapitalisme terkini (abad 21), khususnya pulau Jawa.
  - Membaca sejarah pembentukan dan transformasi komoditas, serta keterkaitannya dengan kriminalisasi?
  - Menggali kisah dan dinamika perlawanan lokal di masing-masing wilayah untuk memperkuat perlawanan terkini.

## LAMPIRAN I (FOTO KEGIATAN)





## LAMPIRAN II (JADWAL KEGIATAN)

Hari I: Kamis, 14 Februari 2019		
Waktu	Materi	Pengisi
08.00-09.00	Sarapan	
09.00-09.30	Pembukaan acara	panitia
09.30-12.30	Diskusi Nasional: <b><i>Perluasan Geografi Industri Ekstraktif, Bencana Ekologis, dan Penyingkiran Kaum Perempuan</i></b>	-KLHK -KKP -KPK -Gubernur Jatim Terpilih -WALHI -JATAM -PUSHAM Surabaya -HRLS -Komunitas perempuan: Lumajang, Banyuwangi, Surabaya, Sidoarjo
12.30-13.30	Istirahat/makan siang	
13.30-15.00	Diskusi Tematik I: <b><i>Perempuan, Patriarki, dan Pusaran Industri Ekstraktif</i></b>	-Perwakilan perempuan korban bencana Lumpur Lapindo-Sidarjo -Akademisi (psikologi) -Solidaritas Perempuan -WALHI Eksekutif Nasional
15.00-15.30	Panggung seni	
15.30-17.00	Diskusi Tematik II: <b><i>Energi Kotor dan Mata Rantai Krisis</i></b>	-Perwakilan warga Celukan Bawang-Bali -Perwakilan warga Batang -Green Peace
Hari II: Jumat, 15 Februari 2019		
08.00-09.30	Sarapan	
09.30-11.00	Diskusi Tematik III: <b><i>Industri Ekstraktif, dan Pelanggaran HAM</i></b>	-Perwakilan perempuan Tumpang Pitu Banyuwangi -Perwakilan perempuan pesisir Lumajang - HRLS Universitas Airlangga -WALHI Jatim -Tekad Garuda
11.00-13.30	Istirahat/shalat Jumat/makan siang	
13.30-15.00	Diskusi Tematik IV: <b><i>Gerakan Perempuan dalam Penyelamatan dan Pemulihan Ruang Hidup</i></b>	-Perwakilan perempuan Jatim: Banyuwangi, Lumajang, Sidoarjo, Surabaya

		-Perwakilan perempuan Kendeng -YLBHI
15.00-15.30	Panggung Seni	
15.30-17.00	Diskusi Tematik V: <b><i>Perempuan, Tata Kelola Pesisir, dan Ancaman Industrialisasi Pariwisata</i></b>	-Perwakilan Perempuan Nambangan Surabaya -Perwakilan Bali Tolak Reklamasi -Warga Pulau Pari-Jakarta -Akademisi -Kiara
<b>Hari III: Sabtu, 16 Februari 2019</b>		
08.00-09.00	Sarapan	
09.00-10.30	Diskusi Tematik VI: <b><i>Gerakan Mahasiswa dan Perjuangan Rakyat</i></b>	-FNKSDA Surabaya -PMII -GMNI -FMN
10.30-11.00	Panggung Seni	
11.00-12.30	Diskusi Tematik VII: <b><i>Air dan Komunitas: Potret Krisis dan Komodifikasi Air</i></b>	-Kruha -Ecoton -Warga Tumpang Pitu - Hendro Sangkoyo (SDE) -Warga Batu
12.30-13.30	Istirahat/makan siang	
13.30-16.00	<b>Lokakarya</b>	1. Sablon dan Cukil sebagai Media Kampanye Perjuangan 2. Menulis Lirik Perjuangan 3. Dasar-dasar Video Editing
16.00-17.00	Panggung Seni	
17.00-17.30	Penutupan	